

NEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF

Edisi April | Tahun 2022 No. 31

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



H. Ahmad Syaikhu

PKS *Tegaskan* Tolak Penundaan Pemilu 2024



Tragis. Sudah Covid, Tertimpa Kenaikan Komoditas dan Isu Penundaan Pemilu

Ditengah keriuhan kenaikan, ironisnya sejumlah pihak terus getol mengkampanyekan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Saling bersahutan dan sundul menyundul dari eksekutif ke legislatif. Saat publik bereaksi, mereka berdalih bahwa itu bagian dari demokrasi dan aspirasi. Pintar memutar kata, membalikan fakta

Wabah Covid 19 belum benar-benar hilang dari bumi pertiwi, meski senyap namun masih merayap dan menyerang jika tidak hati-hati nan waspada dalam menerapkan protokol kesehatan

Mengutip informasi dari laman vaksin.kemkes.go.id, hingga Sabtu (2/4/2022) pukul 12.10 WIB, vaksin dosis pertama telah diterima sebanyak 196.850.337 orang Angka ini mencapai 94,52 persen dari target yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan dosis lengkap atau dosis kedua sudah diterima 159.950.991 orang, mencapai 76,80 persen target. Sementara vaksin dosis ketiga atau vaksin booster telah diterima 23.574.482 orang atau mencapai 11,32 persen.

Utang Indonesia saat ini mencapai 7000 Triliun, angka fantastis dengan defisit yang

melewati batas toleransi. Pemerintah memiliki utang sebesar Rp 109 triliun ke Pertamina dan PLN terkait kompensasi penyaluran BBM dan listrik. Kompensasi tersebut merupakan kewajiban yang harus dibayar hingga tahun 2021. Pemerintah juga masih menunggak pembayaran klaim rumah sakit Covid-19 sebesar Rp25,10 triliun untuk tahun layanan 2021.

Ditengah penanganan covid yang menyimpan banyak persoalan, bersama dengan itu beragam komoditas naik dari mulai energi hingga pangan. Bahkan Pemerintah kalah dan menyerah pada mekanisme pasar minyak sayur, barang ditemukan digeral dengan harga new normal atau mahal. ironisnya hilang ditelan bumi kala harga murah dan normal.

Kelas menengah paling

terasa dari buruknya tata niaga dan tata kelola energi, Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi berjenis Pertamina mengalami kenaikan harga, menyusul Pertamina Turbo dan Dextlite yang telah naik lebih dahulu. Tidak cukup sampai disitu, kenaikan juga terjadi pada LPG 12 Kg dan 5 Kg. Nasib getir belum selesai karena Peralite dan LPG 3 Kg sudah direncanakan naik.

Pemerintah selalu beralasan bahwa kenaikan hanya untuk kelas menengah, dalihnya hanya terjadi di komoditas non subsidi. Namun Pemerintah lupa bahwa golongan ini juga terdampak oleh pandemi. Kenaikan yang beruntun dan bertubi-tubi praktis akan membuat daya beli mereka tergerus, ditengah stagnasi serta penurunan pendapatan

selama dua tahun terakhir.

Ditengah keriuhan kenaikan, ironisnya sejumlah pihak terus getol mengkampanyekan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Saling bersahutan dan sundul menyundul dari eksekutif ke legislatif. Saat publik bereaksi, mereka berdalih bahwa itu bagian dari demokrasi dan aspirasi. Pintar memutar kata, membalikan fakta. Bagaimana demokrasi memberikan ruang bagi melanggengnya kekuasaan yang tanpa kontrol. Konstitusi disusun sekehendak hati, dikoreksi untuk kalangan sendiri. Indonesia ini terlalu besar untuk kepentingan satu dua orang yang merasa istimewa.

Kadang kita berpikir mengapa ada yang sempat berpikir sangat 'absurd' dan

pragmatis di tengah situasi seperti yang lemah dan rapuh. Tapi dalam waktu terakhir ternyata kita bisa lihat ada bantuan sosial pandemi yang di korupsi, pelanggaran bergerombol dan merangsek jauh ke jantung rasa adil masyarakat. Para pihak nampak kehilangan rasa malu dan empati. Melakukan orkestrasi kekuasaan di tengah-tengah tontonan Rakyat.

Maka sudah waktunya setiap peran pengingat melakukan kontrol melekat dan erat terhadap jalannya Pemerintahan. Kita khawatir kondisi makin menjebak Indonesia dalam pusaran masalah yang menahun dan laten. Tidak perlu menjadi seseorang yang berdaya, cukup menjadi manusi Indonesia yang bertanggung jawab

Temukan Indikasi Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan **Fraksi PKS Galang Hak Angket Minyak Goreng dan Dorong DPR Bentuk Pansus Angket**

KUTIPAN

Fraksi PKS DPR menggelar konferensi pers menyikapi kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng di tanah air, Jumat (18/3).

Dalam Konferensi Pers yang dihadiri Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Wakil Ketua Fraksi Bidang Inbang Mulyanto, Wakil Ketua Fraksi Bidang Ekonomi Keuangan Ecky Awal Mucharam, dan sejumlah Anggota FPKS DPR ini, Fraksi PKS memutuskan untuk mengusulkan penggunaan Hak Angket DPR Tentang Kelangkaan dan Kemahalan Harga Minyak Goreng serta mendorong DPR untuk membentuk Pansus Angket.

Fraksi PKS menilai permasalahan minyak goreng ini menyangkut kebijakan penting dan strategis yang berdampak luas pada rakyat. Selain itu, Fraksi PKS menemukan indikasi pelanggaran

undang-undang yang berimplikasi politik maupun hukum.

Selain mengusulkan Hak Angket, Fraksi PKS juga membentuk Tim Investigasi Kelangkaan dan Kemahalan Harga Minyak Goreng guna menyelidiki dan mengurai permasalahan ini dari mulai hulu hingga hilir.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Fraksi PKS sampai pada kesimpulan pemerintah gagal mengatasi gejala pasokan dan harga minyak goreng yang sudah berlangsung berbulan-bulan dan telah menyengsarakan rakyat luas

"Berbulan-bulan rakyat berteriak dimana-mana soal

kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Sayangnya pemerintah seperti angkat 'bendera putih'. Menteri Perdagangan jelas mengatakan tidak bisa mengontrol harga minyak goreng akibat ulah mafia. Kebijakan pemerintah mencabut HET justru melambungkan harga minyak goreng tanpa kontrol di pasaran. Ini menunjukkan negara telah gagal," tandas Jazuli.

Rakyat mengeluh dimana-mana karena minyak goreng langka di pasaran dan harga melambung tinggi hingga 24 ribu lebih dari harga normal 13-14 ribu. Belakangan setelah pemerintah memutuskan untuk mencabut HET, minyak goreng mulai muncul di pasar tapi harga makin melambung tinggi. Hal ini menguatkan dugaan bahwa minyak goreng ditimbulk oleh mafia menunggu momentum harga yang tidak dikontrol pemerintah. Janji pemerintah menjamin stok minyak goreng subsidi di



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Kajian internal Fraksi PKS menemukan pelanggaran undang-undang atas kisruh minyak goreng, antara lain pelanggaran atas sejumlah pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

pasaran pun tidak terbukti.

Indikasi Pelanggaran UU
Fraksi PKS melihat indikasi pelanggaran sejumlah undang-undang dalam kisruh minyak goreng ini dan meminta

bertanggung jawaban pemerintah baik secara politik maupun hukum. Atas dasar itu, pilihan penggunaan hak angket dirasa paling tepat.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

PKS Tegaskan Tolak Penundaan Pemilu 2024

KUTIPAN

Presiden PKS Ahmad Syaikhul mengatakan bahwa PKS telah menggelar Musyawarah Majelis Syuro VI PKS dan hasil dari musyawarah tersebut menolak wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 serta perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

JAKARTA - PKS menolak wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga tiga periode.

Presiden PKS Ahmad Syaikhul mengatakan bahwa PKS telah menggelar Musyawarah Majelis Syuro VI PKS dan hasil dari musyawarah tersebut menolak wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 serta perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

"PKS tegas menolak penundaan pemilu sekaligus menolak perpanjangan masa jabatan Presiden jadi tiga periode," tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (31/3).

Syaikhul berpandangan

bahwa penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden merupakan upaya Pemerintah untuk mengkhianati rakyat yang telah memberi amanah.

Dia juga mengimbau kepada seluruh kader PKS di Parlemen dan sejumlah daerah menolak wacana itu dan tetap fokus menghadapi Pemilu Serentak 2024 nanti.

"Ketika dilakukan perpanjangan masa jabatan Presiden pasti merugikan demokrasi sebab konstitusi kita hari ini adalah amanah rakyat, jangan pernah khianati amanah," katanya.



H. AHMAD SYAIKHU
Presiden PKS

“Penundaan Pemilu Se-rentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden merupakan upaya Pemerintah untuk mengkhianati rakyat yang telah memberi amanah.”



Dukung Hak Angket Migor, Aleg PKS Minta Disparitas Harga Tak Lebih dari 5 Ribu

KUTIPAN

Padang (21/03) --- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina pada Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR dengan Kementerian Perdagangan meminta kepada pemerintah agar disparitas harga minyak curah dan minyak kemasan tidak terlalu jauh.

Saat ini Nevi menilai, jarak harga yang sekitar dua kali lipat bahkan lebih akan sangat memberatkan masyarakat.

Nevi mengatakan, kini Fraksinya, FPKS mengajukan Hak Angket mahalnya harga minyak goreng, dengan usulan dibentuknya Pansus di DPR RI.

"Usulan pansus ini merupakan bentuk upaya FPKS agar persoalan minyak goreng ini ada solusi yang baik untuk masyarakat," ungkapnya.

Karena tingginya harga minyak goreng kemasan yang sudah banjir di pasar modern, imbuh Nevi, sangat sulit bagi masyarakat untuk membelinya. Sedangkan minyak curah yang sesuai HET tidak jelas mekanismenya sehingga rakyat

dapat menikmatinya.

"Secara psikologis, harga minyak goreng dengan kemasan sederhana per dua liter saya pantau ada yang 50 ribu rupiah di pertokoan modern. Stok melimpah tapi masyarakat sangat berat untuk membelinya. Kondisi harga yang melonjak dari 14 ribu menjadi sekitar 24 atau 25 ribu rupiah akan menjadi potensi penyelewengan pada minyak curah yang dikemas. Seharusnya, disparitas harga minyak goreng curah dan kemasan, maksimal 5.000 rupiah perbedaannya. Karena biaya produksi kemas hanya sekitar 1.500 rupiah hingga 3.000 rupiah", tutur Nevi.

Legislator asal Sumatera

Barat II ini sesuai dengan kesimpulan rapat kerja dengan kementerian perdagangan, agar pemerintah melalui kementerian perdagangan, segera melakukan tindakan yang antisipatif terkait perkembangan stabilitasi harga dan pasokan Barang Kebutuhan Pokok menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2022 serta melaporkan secara berkala kepada Komisi VI DPR RI.

"Saya meminta dengan tegas, agar penerapan Surat Edaran Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Relaksasi Penurunan Harga Minyak Goreng Sawit Kemasan, dapat ditinjau ulang berkaitan dengan pelepasan harga pasar. Sedangkan penerapan harga subsidi ada minyak curah 14 ribu per liter, saya minta kejelasan dan kepastian, mekanisme pembelian apakah dapat dipastikan pada pembeli yang tepat dan persoalan stok jangan sampai ada kekacauan seperti pada saat lalu terjadi antrian panjang", tegas Nevi.

Politisi PKS ini sangat sepakat dengan rekomendasi pelaku usaha yang melakukan penyimpanan dan tidak mendukung program pemerintah



Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

"Saya harap, audit produksi dari hulu sampai hilir untuk mencari Harga Pokok Produksi (HPP) Minyak Goreng sesuai dengan angka keekonomian dapat segera dilakukan. Sehingga kontrol Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) minyak goreng untuk kepentingan masyarakat dapat segera direalisasikan kembali",

agar izin usahanya dicabut dan manakala pengusaha tersebut juga mengelola kebun sawit di tanah negara, agar izin Hak Guna Usaha (HGU) akan dicabut. Karena selama ini pemerintah telah memberikan kemudahan kepada para pengusaha sawit, akan tetapi ketika mereka

diharapkan untuk berkontribusi kepada negara tidak mau menjalankannya. Ketegasan pemerintah ini akan mengembalikan kewibawaan pemerintah sebagai entitas tertinggi kekuasaan negara. Selengkapnyapun kunjungi fraksi.pks.id



Aleg PKS Minta BUMN Transportasi Berikan Layanan Terbaik bagi Pemudik

KUTIPAN

Jakarta (01/04) --- Antusiasme masyarakat untuk menjalani mudik lebaran tahun 2022 ini diperkirakan sangat tinggi.

Survei Kementerian Perhubungan menyebut akan ada 80 juta pemudik yang akan mengunjungi kampung halaman mereka di berbagai daerah di Indonesia.

Tingginya jumlah pemudik disebabkan mudik tahun ini merupakan mudik pertama, setelah dua tahun dilarang, sehingga mudik tahun ini begitu dinantikan masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak meminta BUMN Transportasi maupun BUMN terkait layanan transportasi untuk memberikan layanan terbaik bagi para pemudik.

"Utamanya memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pemudik, dengan mempersiapkan layanan

sebaik-baiknya," ungkap Amin.

Amin menjelaskan, sejumlah BUMN Transportasi diantaranya PT KAI, Perum Damri, dan PT Jasamarga untuk transportasi darat. Kemudian PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelni, dan PT Pelabuhan Indonesia untuk transportasi laut. Selanjutnya PT Garuda Indonesia dan PT Angkasa Pura untuk transportasi udara.

Menurut Amin, untuk meminimalisir kecelakaan, diperlukan pengecekan aspek keselamatan baik kelaikan armada transportasi maupun aspek keselamatan di sarana penunjang lainnya seperti di pelabuhan, di sepanjang jalur tol, dan pelabuhan udara. Banyak armada transportasi

milik BUMN yang selama dua tahun terakhir diparkir atau tidak beroperasi akibat pandemi.

"Pengecekan kondisi kendaraan apakah laik jalan atau tidak dan juga aspek keselamatan lainnya sangat penting," ujarnya.

Pembelian tiket dan pengaturan jadwal harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sejak dini agar tidak terjadi antrean dan kerumunan. Amin pun mengapresiasi digitalisasi tiketing oleh sejumlah BUMN Transportasi, sekaligus memudahkan calon pemudik untuk memperoleh tiket.

Amin pun meminta BUMN penyelenggara layanan mudik untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat, baik di terminal keberangkatan, selama di perjalanan, di rest area (tol), maupun di pelabuhan dan pelabuhan udara. Hal itu penting agar tidak terjadi penularan covid-19 selama proses mudik maupun arus balik berlangsung.

"Saya meminta BUMN di sektor transportasi untuk mematuhi surat edaran Kepala BNPB No.11 Tahun 2022 yang mencabut kewajiban tes swab antigen dan PCR untuk warga yang akan melakukan perjalanan udara, darat, dan laut. Jangan mempersulit para pemudik," harap Amin.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



AMIN AK, M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

"Saya meminta BUMN di sektor transportasi untuk mematuhi surat edaran Kepala BNPB No.11 Tahun 2022 yang mencabut kewajiban tes swab antigen dan PCR untuk warga yang akan melakukan perjalanan udara, darat, dan laut. Jangan mempersulit para pemudik,"

Paradoks Minyak Goreng, Wakil Ketua FPKS: Negara Mesti Hadir, **Jangan Lepas Tangan!**

KUTIPAN

Jakarta (21/03) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menyayangkan sikap pemerintah yang lepas tangan terkait lonjakan harga minyak goreng (migor).

Alih-alih ikut mengatur harga migor agar terkendali, Pemerintah malah menyerahkan masalah ini pada mekanisme pasar. Ini sama saja Pemerintah lepas tangan terhadap urusan masyarakat.

Mulyanto menyebut karena sikap pemerintah yang abai seperti itu Indonesia mengalami paradoks atau sesuatu yang bertentangan.

"Negeri yang kaya sumber daya alam (SDA) seperti Indonesia malah mengalami kelangkaan migor. Harga CPO dunia tinggi tapi tidak menjadi berkah malah menuai musibah," terang Mulyanto.

Mulyanto menambahkan dibanding Malaysia, harga migor di Indonesia sangat tinggi. Di Malaysia migor subsidisi dijual Rp.8.500 per kg dan

migor non subsidi Rp. 19 ribu per kg.

Sementara di Indonesia berdasarkan kebijakan baru tanggal 16 Maret 2022, harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng (migor) curah menjadi sebesar Rp. 14 ribu per liter, naik dari sebelumnya Rp. 11.500 per liter. Sementara harga migor kemasan dilepas melalui mekanisme pasar yang harganya sekarang menjadi sekitar Rp 28 ribu/liter

"Seharusnya harga migor di Indonesia sama atau mendekati harga migor di negeri jiran itu. Pasalnya kita sama-sama produsen CPO utama dunia. Bahkan Indonesia, dibanding Malaysia, memiliki lahan kelapa sawit yang luas dan masih dapat ditingkatkan," ungkapnya.

Di sisi lain dengan kenaikan harga CPO dunia yang tinggi, imbas Perang Rusia-Ukraina, maka seharusnya Indonesia sebagai negara eksportir CPO dan turunannya dapat menanggung berkah, bukan malah sebaliknya menuai musibah.

"Kisruh kemalahan dan kelangkaan migor. Bahkan menimbulkan beberapa korban jiwa saat antrian panjang migor," tegas Mulyanto.

Terkait hal tersebut Mulyanto minta pemerintah mau bersikap adil. Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan yang menguntungkan rakyat. Bukan hanya menguntungkan beberapa gelintir pengusaha.

"Ini kan soal 'managing the nation'. Bagaimana kita mengelola negara, menjalankan amanat konstitusi, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan membangun kesejahteraan umum. Negara tidak boleh lepas tangan dengan dalih menyerahkannya pada mekanisme pasar. Baik terhadap harga migor dalam negeri maupun terhadap durian



Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

"Seharusnya harga migor di Indonesia sama atau mendekati harga migor di negeri jiran itu. Pasalnya kita sama-sama produsen CPO utama dunia. Bahkan Indonesia, dibanding Malaysia, memiliki lahan kelapa sawit yang luas dan masih dapat ditingkatkan,"

runtu windfall profit yang diterima eksportir dari lonjakan harga CPO dunia," kata Mulyanto.

Pemerintah, kata Mulyanto, perlu peningkatan pajak ekspor CPO dan turunannya yang bersifat

progresif sebanding dengan peningkatan harga CPO internasional. Negara harus hadir mengatur dengan menarik pajak dari si kaya untuk meringankan beban si miskin.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Minyak Goreng Mahal, Legislator PKS: **Sengsarakan Rakyat** di Tengah Pandemi

KUTIPAN

Cirebon (23/03) -- Anggota DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetyani turut menyoroti langka dan mahalnnya harga minyak goreng di tanah air. Menurut Netty dicabutnya peraturan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan akan menyengsarakan rakyat kalangan menengah ke bawah.

"Sekarang kita sudah bisa melihat setelah peraturan HET ini dicabut harga minyak goreng kemasan perlahan melonjak naik di pasaran. Kebijakan ini sangat menyengsarakan rakyat menengah ke bawah. Ibu-ibu menjerit, terutama saat banyak keluarga di Indonesia terkena PHK dan dirumahkan akibat Pandemi Covid-19." kata Netty, Selasa (22/03/2022).

"Rakyat juga dibuat bingung karena sebelumnya minyak goreng langka tapi sekarang stoknya melimpah namun harganya melonjak gila-gilaan. Artinya selama ini memang ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang 'ber-

main' minyak goreng " tambah Netty yang juga Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial ini.

Sebelumnya pemerintah per 16 Maret telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 11 tahun 2022 yang mencabut ketentuan HET Permendag Nomor 06 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng. Netty juga berharap pemerintah tidak kalah dengan kepentingan bisnis para pengusaha.

"Pemerintah tidak boleh kalah dengan kepentingan bisnis para pengusaha. Jangan biarkan segelintir orang bisa semena-semena mengatur dan

menguasai kebutuhan hidup banyak orang seperti minyak goreng" katanya.

Politisi Perempuan asal Jawa Barat ini juga merasa aneh jika Indonesia kalah dengan negara Malaysia dalam hal harga minyak goreng.

"Kenapa Malaysia bisa harganya lebih murah? Apalagi kita ini adalah negara produsen minyak sawit nomor satu di dunia sejak bertahun-tahun lalu. Aneh kalau minyak goreng kita bisa langka dan kalaupun ada justru harganya meroket" ungkapnya.

"Fraksi PKS DPR RI juga akan mengajukan hak angket untuk menyelidiki fenomena kelangkaan dan mahalnnya harga minyak goreng ini. Biar kita mengetahui dengan jelas di mana akar masalahnya" tambahnya.



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Kesra

"Kenapa Malaysia bisa harganya lebih murah? Apalagi kita ini adalah negara produsen minyak sawit nomor satu di dunia sejak bertahun-tahun lalu. Aneh kalau minyak goreng kita bisa langka dan kalaupun ada justru harganya meroket"



HNW: Apapun Hasil Judicial Review UU IKN, **Wajarnya** Jakarta Jadi Daerah 'Istimewa'

KUTIPAN

Jakarta (22/03) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mengingatkan semua pihak terkait dengan pemindahan Ibukota dan judicial review UU IKN ke MK, untuk tetap mementingkan Jakarta, apapun hasil judicial review tersebut.

Hidayat menambahkan Pemerintah juga perlu mempertimbangkan orientasi terkait Jakarta adalah yang menghadirkan skenario positif dan konstruktif, bukan skenario negatif apalagi destruktif.

"Apalagi Presiden Jokowi sejak awal mengumumkan programnya untuk memindahkan ibukota dari Jakarta pernah menyatakan secara terbuka bahwa Jakarta tetap jadi prioritas Pembangunan, tidak akan dilupakan, akan dikembangkan jadi kota bisnis, pusat perdagangan skala regional bahkan skala global. Bahkan, Jakarta beliau ibaratkan akan seperti New York yg ditinggalkan AS berpindah ibukota ke

Washington DC. Bahkan pada 26/8/2019 Jokowi juga dikabarkan menyatakan bahwa sudah disiapkan anggaran Rp.571 T untuk urban regeneration di Jakarta," jelas Hidayat.

HNW sapaan akrabnya mengatakan upaya mengawal agar skenario positif konstruktif seperti di atas dapat benar-benar terlaksana, dan tidak sekedar janji belaka. Apalagi dengan adanya beberapa pengalaman negara-negara lain yang memindahkan ibukota, tapi kemudian ibukotanya yang lama tidak berkembang bahkan mengalami kemunduran dibanding ketika dulu menjadi ibukota.

HNW mencontohkan kasus

seperti di Myanmar dengan perpindahan ibukotanya dari Yangon ke Naypyidaw atau Kazakhstan dengan perpindahan ibukota dari Almaty ke Astana (kemudian berubah menjadi Nur Sultan).

"Mantan ibukota negara-negara tersebut dinilai tidak berkembang atau tetap maju pasca perpindahan ibukota, bahkan cenderung sepi.

Tentunya ini tidak boleh terjadi terhadap Jakarta. Apalagi Jakarta mempunyai sejarah panjang sebagai ibukota RI, tempat terjadinya banyak sekali peristiwa sejarah nasional yang sangat penting, juga infrastruktur dan suprastruktur yang sudah ada dan dibangun di atasnya. Mestinya Jakarta menjadi seperti mantan Ibukota negara-negara yang lain yang terus berkembang bahkan sesudah tidak menjadi Ibukota seperti Istanbul, Kuala Lumpur, Kyoto atau Melbourne yang bahkan disebut sebagai The World's Most Liveable Cities," ujarnya.

Hal tersebut disampaikan oleh HNW dalam diskusi publik



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"Apapun hasil judicial review UU IKN nanti, Jakarta harus tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan, sebagaimana janji Presiden Jokowi, dan provinsi yang tetap mempunyai keistimewaan sebagaimana seharusnya bangsa Indonesia mengamalkan ajaran Bung Karno, Jas Merah (Jangan Sekali-kali Meninggalkan/Melupakan Sejarah),"

bertajuk 'Menggagas Masa Depan Jakarta' yang diselenggarakan oleh DPW PKS DKI Jakarta pada Senin (21/03).

Selain HNW, pembicara dalam diskusi tersebut adalah Anggota DPD RI dari Jakarta

Dailami Firdaus dan Pakar Tata Kota Adriadi Dimastanto. Dibacakan juga sambutan tertulis dari mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Aleg PKS : Bersyukur PBB Tetapkan 15 Maret sebagai Hari Lawan Islamofobia

KUTIPAN

Jakarta (18/03) --- PBB telah menetapkan tanggal 15 Maret sebagai hari melawan Islamofobia. Kebencian terhadap Islam dan pemeluknya telah mewarnai kehidupan masyarakat di banyak negara di dunia.

Tidak hanya di negeri-negeri yang masyarakat Muslimnya minoritas, bahkan di negeri yang mayoritas penduduknya Muslim pun Islamofobia itu ada.

Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, Jumat (18/3) di Jakarta menanggapi bahwa pihaknya sudah menyuarakan isu ini sejak lama.

"Kita sudah cukup lama menyuarakan hal ini di berbagai kesempatan, bahwa Islam itu bukan ancaman, Islam ajaran yang menebar rahmah atau kasih sayang untuk seluruh alam, dunia tidak perlu dan tidak seharusnya takut. Kita bersyukur PBB menetapkan ini, mengambil kebijakan untuk melawan Islamofobia."

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) ini berharap agar bangsa

Indonesia bisa mengambil momen ini sebagai motivasi untuk NKRI sebagai negara Pancasila terus menjaga dan mencegah Islamofobia merebak di seluruh lini kehidupan mulai dr pemerintahan hingga masyarakat.

Sukamta yang juga doktor jebolan Salford University, Manchester, Inggris ini menjelaskan Islamofobia sudah ada sejak dulu, bahkan sebelum tragedi WTC 11 September 2001. Khususnya setelah peristiwa tersebut, dunia mengancam terorisme yang disematkan kepada Islam dan kaum Muslim.

"Islamofobia semakin merebak di banyak negara. Kebebasan masyarakat Muslim untuk menjalankan ajaran agamanya direnggut. Tidak sampai di situ, bahkan ada yang

sampai melakukan tindakan kekerasan, pelecehan terhadap Muslimah, dan lainnya," ungkap Sukamta.

Di dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan berpolitik pun begitu. Masyarakat Muslim yang ingin mengamalkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam berpolitik kerap kali menjadi sasaran Islamofobia, dicap ekstrimis, radikal, hingga dikait-kaitkan dengan terorisme.

"Di tengah gencarnya anti radikalisme dan anti terorisme, semoga semangat anti Islamofobia yang telah dicontohkan oleh PBB ini dapat kita terapkan juga di negeri Indonesia yang mayoritasnya berpenduduk Muslim dan bercorak moderat. Karena Islam sudah menjadi darah, daging dan tulang punggung sejarah bangsa ini yang mengukuhkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI sebagai pedomannya," harap legislator dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.



H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Kita sudah cukup lama menyuarakan hal ini di berbagai kesempatan, bahwa Islam itu bukan ancaman, Islam ajaran yang menebar rahmah atau kasih sayang untuk seluruh alam, dunia tidak perlu dan tidak seharusnya takut. Kita bersyukur PBB menetapkan ini, mengambil kebijakan untuk melawan Islamofobia



Komisi II Minta Kejelasan STIA LAN Makassar tentang Kurikulum Transformasi Digital Pengelolaan Negara

KUTIPAN

Makassar (28/03) – Anggota Komisi II DPR RI Chairul Anwar meminta kejelasan kepada sivitas akademika STIA LAN Makassar tentang implementasi kurikulum transformasi digital dalam pengelolaan negara.

Sebab, para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di politeknik tersebut sebagian besar adalah para aparatur sipil negara yang memiliki tuntutan beradaptasi di era digital, khususnya peningkatan keterampilan administrasi negara.

“Nah ini terobosan apa yang mau diambil untuk peningkatan administrasi negara kita dalam bidang teknologi digital tersebut?” ujar Chairul saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke STIA LAN Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (23/3/2022).

Untuk merespon tantangan perkembangan zaman ini, ia meminta agar

pihak kampus intensif melakukan lobi ke pihak-pihak terkait, guna mendapatkan alokasi bantuan dana pendidikan sebagai mandatory spending 20 persen dari APBN untuk pendidikan.

“Sama halnya saat saya di Komisi IX beberapa waktu lalu. Anggaran kesehatan saya pikir di Kemenkes masuk diambil dari situ. Jadi, anggaran pendidikan kita yang khusus dari APBN masuk ke banyak instansi,” jelas politisi PKS ini.

Meskipun demikian, ia meyakini untuk pengalokasian anggaran APBN untuk STIA LAN Makassar akan banyak pihak

yang akan turut serta membantu.

“Jadi, apresiasi saya luar biasa kepada para pendidik ini, kita hormat. Sehebat-hebatnya kita itu kita pasti hormat dengan guru kita. Apresiasi kepada dosen meskipun dengan segala keterbatasan,” pesan legislator daerah pemilihan (dapil) Riau I itu.

Diketahui, institusi Politeknik STIA LAN Makassar ini memiliki akreditasi B. Perguruan tinggi negeri di bawah Lembaga Administrasi Negara ini memiliki tingkatan sarjana maupun magister terapan.

Adapun biaya pendaftaran untuk Program Sarjana Terapan sebesar Rp250 ribu sedangkan untuk Program Magister Terapan sebesar Rp500.000.

Informasi dari pihak kampus mengemuka bahwa selama ini institusi tersebut belum pernah mendapatkan bantuan APBN yang khusus dialokasikan untuk pendidikan sebesar 20 persen.



Drs. CHAIRUL ANWAR Apt.

Anggota Komisi II DPR RI

“Untuk pengalokasian anggaran APBN untuk STIA LAN Makassar akan banyak pihak yang akan turut serta membantu. Jadi, apresiasi saya luar biasa kepada para pendidik ini, kita hormat. Sehebat-hebatnya kita itu kita pasti hormat dengan guru kita. Apresiasi kepada dosen meskipun dengan segala keterbatasan

Melonjaknya Harga Minyak Goreng, Habib Aboe: Negara dikuasai oleh Oligarki itu Aib!

KUTIPAN

Jakarta (30/03) -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Al-Habsyi mengutarakan pandangannya terkait dengan isu kenaikan harga minyak goreng yang tak kunjung usai.

Pandangan ini disampaikan oleh pria yang akrab disapa Habib Aboe dalam kesempatannya mengikuti rapat Komisi III DPR RI dengan mitra Komisi III Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada ruang rapat Komisi III DPR RI, Selasa (29/03/2022).

Habib Aboe menyampaikan kekhawatirannya akan isu melonjaknya harga minyak goreng yang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Sekretaris Jendral Fraksi PKS ini memprediksikan bahwa ke depannya isu minyak goreng akan diikuti oleh kenaikan harga komoditas lainnya yang krusial dalam menopang hidup masyarakat mengingat data-

nya bulan suci Ramadhan yang tinggal menghitung hari.

“Baru-baru ini masyarakat dibingungkan oleh isu hilangnya minyak goreng. Apalagi menjelang hari raya, barang lainnya akan ikut naik. Terlebih lagi adanya pernyataan dari Menteri bahwa lebih baik kuantitas barang sedikit, tetapi harga mahal”, papar Habib Aboe.

Sehubungan dengan isu tersebut, Anggota Komisi III DPR RI ini mempertanyakan peran dari Polri dan TNI dalam menyikapinya. Tuntutan akan adanya penyelidikan secara tegas untuk mengusut tuntas kasus ini dilayangkan Habib Aboe kepada pihak aparat yang berwenang.

“Kalau saya tidak salah, dalam intelkam terdapat

direktur yang membawahi bidang ekonomi. Lantas, apakah penyelidikan secara mendalam sudah dilakukan untuk kasus ini? Kalau memang ada mafia, maka kita harus menemukan siapa tersangka di baliknya” Tambahnya.

Sebagai penutup, Anggota DPR RI dengan Dapil Kalimantan I ini mengutarakan pentingnya kasus ini diusut dengan tuntas. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat adalah harga dari adanya kasus ini yang seharusnya tidak digadaikan untuk kepentingan segelintir orang.

“Saya pikir kalau sampai negara kalah dengan mafia itu aib. Tidak boleh oligarki berkuasa dengan seenaknya. Mengatur Gerakan distribusi komoditas berdasarkan tingginya harga. Jika negara dikuasai oleh oligarki, lantas bagaimana nasi banak bangsa? Bagaimana nasib kaum duafa?” tegasnya.



HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

“Saya pikir kalau sampai negara kalah dengan mafia itu aib. Tidak boleh oligarki berkuasa dengan seenaknya. Mengatur Gerakan distribusi komoditas berdasarkan tingginya harga. Jika negara dikuasai oleh oligarki, lantas bagaimana nasi banak bangsa? Bagaimana nasib kaum duafa?”



Bukan Pertumbuhan Ekonomi yang Meroket, Melainkan Hutang Negara PKS Minta Pemerintah Serius Tuntaskan Janji Kurangi Utang Negara

■ **Utang pemerintah** di era Presiden Jokowi terus mengalami kenaikan. Bahkan dalam kurun waktu 2014 hingga 2019, pemerintah sudah mencetak utang baru sebesar **Rp 4.016 triliun**

■ Per akhir Februari 2022, posisi utang pemerintah berada di angka **Rp 7.014 triliun** dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar **40,17 %**

■ Rincian utang pemerintah (dalam triliun rupiah)



Desain : Aditya Angga



Terkait Presiden Jokowi yang Marah Soal Impor, Politisi PKS: **Bentuk Frustrasi, Tak Mampu Kelola Negara**

KUTIPAN

Jakarta (28/03) --- Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Bali pada Jumat (25/03/2022), terlihat sangat marah kepada instansi pemerintah yang masih melakukan sejumlah impor barang. Padahal, menurutnya, barang-barang tersebut masih bisa diproduksi di dalam negeri.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet mengatakan bahwa apa yang diungkapkan presiden tersebut adalah bentuk frustrasi atas ketidakmampuannya mengelola negara.

Hal itu juga sekaligus menunjukkan lemahnya leadership, karena kesalahan tidak bisa dilimpahkan begitu saja kepada anak buah.

Slamet juga mengungkapkan bahwa persoalan impor ini adalah hal yang wajar sejak 7 tahun presiden berkuasa sehingga presiden tidak perlu

membuat gimmick tersebut.

"Salah satu yang dipersoalkan Jokowi adalah alat-alat pertanian yang tidak memiliki teknologi tinggi namun tetap saja didatangkan melalui impor," ungkapnya.

Slamet menegaskan seharusnya presiden mempertanyakan ke diri sendiri berapa anggaran riset dan pengembangan teknologi yang sudah digelontorkan pemerintah untuk menghasilkan teknologi-teknologi yang aplikatif?

Menurut data, sejak tahun 2015 anggaran Kementerian

Pertanian terus mengalami penurunan mulai dari Rp30 triliun hingga tahun 2022 turun menjadi Rp15 triliun yang hanya sekitar 5 persen anggarannya dialokasikan untuk riset dan pengembangan.

Selain itu, data Royal Society tahun 2020 menunjukkan proporsi anggaran riset dan pengembangan terhadap Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia hanya 0,31 persen jauh di bawah Malaysia yang mencapai 1,29 persen dan Singapura 2,64 persen dari PDB.

Persoalan lainnya, imbuh Slamet, adalah kurangnya pemanfaatan inovasi yang dihasilkan oleh litbang pemerintah, swasta ataupun perguruan tinggi, menyebabkan Indonesia dibanjiri produk impor dengan teknologi negara lain. "Padahal teknologi negara lain serupa dengan hasil riset yang dikembangkan perguruan tinggi, litbang pemerintah ataupun swasta di Indonesia," kata Slamet.

Slamet mencontohkan beberapa alat pertanian seperti hand tracker, sesungguhnya bisa dibuat.



drh. H. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI

“Seharusnya presiden mempertanyakan ke diri sendiri berapa anggaran riset dan pengembangan teknologi yang sudah digelontorkan pemerintah untuk menghasilkan teknologi-teknologi yang aplikatif?”

"Jadi tidak mengherankan banyak produk teknologi pertanian yang beredar di Indonesia adalah produk impor karena memang kebijakan liberalisasi perdagangan ini semakin terbuka lebar akibat kebijakan pemerintah sendiri.

Sehingga tidak perlu presiden membuat gimmick seolah-olah kesal dengan impor tapi di sisi yang lain kebijakannya sangat pro terhadap impor baik teknologi maupun komoditas pertanian," katanya.

Raker dengan Kementan, Aleg PKS Minta Pemerintah **Fokus** Tingkatkan Produksi Kedelai dan Daging

KUTIPAN

Jakarta (23/03) --- Rapat Kerja DPR RI Komisi IV dengan kementerian Pertanian, membahas Ketersediaan stok pangan menjelang ramadhan dan hari besar keagamaan nasional; Strategi peningkatan produksi pertanian tahun 2022; Tindak lanjut kunjungan kerja Komisi IV DPR RI; Program prioritas tahun 2023; dan Isu-isu aktual lainnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah lebih fokus dalam meningkatkan produksi Kedelai dan Daging, baik daging sapi maupun daging ayam.

Meski rapat kerja sempat tertunda akibat keterlambatan menteri karena menghadiri rapat terbatas dengan presiden sehingga membuat sebagian Anggota DPR geram, namun raker tetap berjalan sesuai yang diharapkan dengan menghadirkan direktur Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia dan Dirut

RNI. "Saya ingin pemerintah lebih fokus pada peningkatan Kedelai dan daging ini. Meski menjelang puasa ramadhan ini ketersediaan bahan pangan cukup, kecuali minyak goreng, masih bermasalah, namun indikasi dua komoditas ini masih menjadi persoalan besar dari hulu hingga hilir sehingga meresahkan sebagian besar petani maupun peternak, para pedagang dan distributor hingga konsumen akhir yang mengkonsumsi tahu tempe dan

daging di beberapa wilayah Indonesia", tutur Akmal dalam rapat kerja.

Politisi PKS ini memberi usulan berkaitan peningkatan produksi kedelai, yakni diperlukan off taker atau jaminan pembelian dari pemerintah terkait produksi kedelai yang ditanam oleh petani. Petani tanpa di dorong-dorong pihak luar, akan secara alamiah akan menanam kedelai bila pemerintah memberikan insentif jaminan pembelian dengan harga yang layak sehingga kedelai terserap dengan memberi keuntungan yang memadai untuk kehidupan mereka.

Di Bagian hulu, a juga mengarahkan solusi tersebut untuk PT Pupuk Indonesia (Persero). Andi berharap, ada insentif mulai dari bibit, pupuk, asuransi dan pembeliannya.

"Untuk kedelai saya memberikan usulan, ada jaminan pembelian. Saya kira kata kuncinya di situ. Petani kita diberikan insentif, benih pupuk. Kalau tidak ada kepastian pembelian dan harga yang jelas



**Dr. H. ANDI AKMAL
PASLUDDIN, S.P., M.M.**

Anggota Komisi IV DPR RI

"Saya meyakini bahwa produksi nasional pangan kita cukup. Hanya saja para petani ini tidak berdaya pada saat harga anjlok yang membuat jatuh mereka baik secara fisik maupun psikologis. Off taker ini mesti dapat dijalankan, sehingga petani ada ketenangan dalam usahanya berkontribusi memenuhi kebutuhan pangan Nasional"

mereka tidak akan menanam. Jadi kata kuncinya kita meningkatkan produksi dan mengurangi impor," jelasnya dalam rapat kerja bersama

Komisi IV DPR RI, Selasa (22/3/2022).

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Semua Harga Melonjak Jelang Puasa, Politisi PKS Nilai Pemerintah **Langgar** **Konstitusi**

KUTIPAN

Jakarta (02/04) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai saat ini pemerintah telah melakukan pelanggaran konstitusi dimana gejolak harga terus bergerak tidak terkendali sehingga menjadi pukulan berat bagi masyarakat.

Padahal, menurut Johan, dibentuknya pemerintahan berdasarkan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah untuk melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.

"Saya menilai pemerintah telah abai pada tujuan keberadaannya di negeri ini, coba bayangkan saat ini ada mayoritas rakyat Indonesia yang akan melaksanakan ibadah puasa yang biasanya tingkat konsumsinya meningkat 10-20%, namun pemerintah jangankan bisa melindungi dan memfasilitasi malah rakyat semakin dibebani dan dibiarkan sendiri berhadapan dengan pasar, karena itu kita harus menuntut pemerintah agar hadir memberikan

perlindungan bagi seluruh rakyat ini" ujar Sekretaris Fraksi PKS MPR RI ini.

Politisi PKS ini menjelaskan bahwa menjelang puasa ini semua komoditas seperti minyak goreng, gula, pulsa, bahan bakar minyak (BBM), gas, tarif tol dan lain-lain mengalami kenaikan harga yang hal ini menunjukkan bahwa tata Kelola pasar digerakkan oleh paradigma pasar bebas atau liberalism, padahal konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

"Adanya fluktuasi harga yang tidak terkendali ini akibat bentuk pasar di Indonesia cenderung oligopoli bahkan

monopoli, dan kita menyaksikan pemerintah tidak mampu memperbaiki mekanisme pasar sehingga harus tunduk pada kekuatan pasar, inilah yang saya sebut pemerintah telah melanggar konstitusi karena kebijakannya tidak mampu melindungi kepentingan rakyat malah kalah dengan kepentingan pasar" urai Johan.

Selanjutnya Johan memaparkan sesuai pasal 33 ayat 3 UUD tahun 1945 yang memberi mandat pada pemerintah bahwa penggunaan semua sumberdaya di negara kita harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Berdasarkan konstitusi ini jelas pemerintah telah melakukan pelanggaran karena dari sisi kebijakan tidak berorientasi untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyat, sebagai contoh kebijakan CPO yang lebih diprioritaskan untuk ekspor padahal rakyat lebih membutuhkan untuk kepentingan domestik sehingga muncullah fenomena kelangkaan minyak goreng dan harga yang tergantung pasar" cetus Johan.

Anggota Komisi IV DPR RI



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

"Pemerintah tidak boleh kalah dan takluk pada kekuatan pasar, saya tegaskan kebijakan pemerintah harus sesuai dengan kepentingan rakyat dan tidak boleh tunduk pada kekuatan pasar"

ini menguraikan bahwa harga bahan pangan di negara kita tidak kompetitif dibandingkan dengan negara-negara berkembang di Asia lainnya.

Johan menyebut kenaikan harga bahan pangan akan menimbulkan tekanan bagi 81% penduduk Indonesia.

"Ini artinya kestabilan harga pangan merupakan amanat konstitusi yang harus ditunai oleh pemerintah sebab berkaitan erat dengan perlindungan seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia," papar Johan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP) Mangkrak, Aleg PKS: Pemerintah Pembohong!

KUTIPAN

Jakarta (26/03) --- Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS DPR RI, Saadiah Uluputty, dalam Agenda Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluapkan emosinya sebagai respon dari apa yang disampaikan oleh Menteri KKP mengenai kelanjutan pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP) di Maluku, dalam Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (23/03/2022).

Saadiah menilai pernyataan Menteri KKP tentang tidak adanya uang pada proyek ini merupakan alasan yang tidak dapat diterima, sebab ini sudah menjadi janji Presiden Joko Widodo sejak tahun 2016 silam. Ia turut pula mengkritik rencana pemerintah yang ingin mengundang dan

mendatangkan investor dalam proyek ini.

"Tidak boleh ada alasan, tidak ada duit, tidak ada uang. Ini soal janji presiden yang kesana wara-wiri dengan beberapa Menteri. Presiden menyampaikan sejak 2016, akan dibangun ground breaking-nya bulan November

2017, kalau dikatakan tidak ada anggaran, kami tidak bisa terima" ujar Saadiah dengan lantang.

Dalam penyampaiannya, ia turut membandingkan apabila alasan tidak adanya dana, bagaimana dengan proyek kereta cepat Bandung-Jakarta, bahkan sampai pada proyek pemindahan ibu kota negara (IKN).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa laut Maluku memberikan kontribusi 37% untuk negara. Sehingga, hanya dengan alasan tidak ada uang, ia menilai pemerintah sangat tidak adil. Bahkan secara tegas dan lantang, ia menyatakan bahwa pemerintah bohong soal janji program-programnya.

"Kalau hari ini bilang tidak ada uang, kemana presiden dan menko maritim dan investasi. Benar-benar kami ditipu, ini pembohongan. Saya tidak bisa terima" ucapnya.



SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

"Tidak boleh ada alasan, tidak ada duit, tidak ada uang. Ini soal janji presiden yang kesana wara-wiri dengan beberapa Menteri. Presiden menyampaikan sejak 2016, akan dibangun ground breaking-nya bulan November 2017, kalau dikatakan tidak ada anggaran, kami tidak bisa terima"

Wacana Mudik Masih Harus Tes Antigen dan PCR, Aleg PKS: Situasi Terkini Covid-19 Sudah Membaik

KUTIPAN

Jakarta (27/03) - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, mengkritik wacana kebijakan yang digulirkan Pemerintah terkait pengaturan perjalanan mudik pada cuti bersama Idul Fitri tahun ini.

"Berdasar isu yang berkembang, nantinya terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang akan melakukan mudik hari raya Idul Fitri, termasuk di antaranya, pemudik yang baru mendapatkan dua dosis vaksin Covid-19 diwajibkan menjalani Rapid Tes Antigen sebelum melaksanakan mudik. Sedangkan pemudik yang baru mendapatkan satu dosis vaksin dosis 1 Covid-19 diwajibkan menjalani tes PCR sebelum mudik", ungkap Suryadi dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (26/03).

Menurut pria yang akrab disapa SJP ini, wacana aturan terbaru yang masih mengharuskan pemudik untuk tes antigen dan/atau PCR terkesan meng-

ada-ada dan tidak sesuai situasi terkini.

"Aturan terkait yang terakhir, yaitu SE Satgas Covid 19 No.11 Tahun 2022 menyatakan bahwa Pelaku Perjalanan Dalam Negeri yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen", ungkapnya.

Sehingga, imbuh SJP, aturan mudik yang akan dikeluarkan Pemerintah justru memperlihatkan suatu kemunduran atas situasi Covid-19 yang ada saat ini. Padahal, menurutnya, situasi saat ini sudah membaik.

"Jumlah kasus harian Covid-19 saat ini hanya berkisar sekitar 6 ribu kasus per hari, sehingga sudah jauh lebih rendah daripada puncak gelombang kedua Covid-19 pada bulan Februari 2022 yang berada pada kisaran angka 60 ribu kasus per hari. Apalagi para ahli dari WHO pada bulan Januari 2022 lalu telah menyatakan bahwa booster vaksin tidak diperlukan bagi orang dewasa dan anak yang sehat", tegas Anggota DPR dari Dapil NTB ini.

Berdasar pertimbangan itu, lanjutnya, Fraksi PKS meminta Pemerintah memperhatikan situasi terkini dan peraturan yang sudah ada sebelumnya untuk mempermudah masyarakat yang ingin mudik.

"F-PKS mendorong Pemerintah tidak membuat aturan yang berlebihan serta lebih mengutamakan membuat kebijakan sesuai data dan fakta yang ada di lapangan. Jangan sampai masyarakat menangkap kesan bahwa aturan mudik tersebut dibuat sebagai alasan untuk menghabiskan stok alat pengesanan antigen atau PCR saja", tutupnya.



H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.

Anggota Komisi V DPR RI

"FPKS mendorong Pemerintah tidak membuat aturan yang berlebihan serta lebih mengutamakan membuat kebijakan sesuai data dan fakta yang ada di lapangan. Jangan sampai masyarakat menangkap kesan bahwa aturan mudik tersebut dibuat sebagai alasan untuk menghabiskan stok alat pengesanan antigen atau PCR saja"



Booster Jadi Syarat Mudik,

Legislator PKS: Stop Buat Aturan Aneh Saat Mudik!

KUTIPAN

Jakarta (26/03) --- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo menentang rencana pemerintah mewajibkan vaksin booster sebagai syarat perjalanan pada mudik Lebaran Tahun 2022.

Sigit menilai mewajibkan vaksin booster sebagai syarat perjalanan adalah kebijakan yang aneh dan menyusahkan rakyat yang sudah dua tahun tidak mudik.

"Sesuai dengan pernyataan KEMENKES, booster itu tidak wajib tapi pilihan bagi masyarakat yang ingin menambahkan kekebalan. Karena sifatnya pilihan, jangan dijadikan syarat wajib perjalanan dong. Bikin susah masyarakat saja yang mau mudik," Kata Sigit.

Menurut Sigit, selama dua tahun terakhir pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan yang membingungkan dan menyusahkan rakyat disaat menjelang mudik Lebaran. Namun, untuk perayaan lain

seperti libur Natal dan Tahun Baru pemerintah terkesan memberikan kelonggaran.

"Sudah dua tahun aturan perjalanan untuk mudik sangat ketat, bahkan ada pelarangan dan penyekatan. Tapi lihat, saat hari libur lain kebijakannya lebih longgar. Bahkan, yang tadinya direncanakan ada pengetatkan, malah dihapus dan dilonggarkan syarat perjalanannya," Kata Sigit.

Untuk itu, Sigit mendesak pemerintah tidak mewajibkan vaksin booster sebagai syarat perjalanan saat mudik Lebaran nanti. Menurutnya, aturan perjalanan yang saat ini berlaku sudah cukup untuk mencegah covid-19.

"Stop aturan perjalanan yang aneh-aneh. Aturan itu

harus jelas dan jangan selalu berubah-ubah sesuka hati. Bikin susah masyarakat saja. Cukup vaksin lengkap dan jaga prokes. Juga tidak perlu antigen atau PCR lagi. Waktu pelaksanaan MotoGP aja syarat mutlak prokes dilanggar, kenapa setiap mudik aturannya selalu buat susah. Sebagian masyarakat juga menolak vaksin booster menjadi syarat perjalanan dan menjadi trending topik di media sosial." Kata Sigit.

Disisi lain, Sigit menilai penerapan vaksin booster sebagai syarat perjalanan akan menyebabkan sektor transportasi kembali terpuruk seperti tahun sebelumnya.

"Saat ini operator transportasi umum mulai dari darat, laut, udara dan kereta api sudah menunjukkan perbaikan setelah aturan perjalanan diperlonggar. Saat mudik ini tentu sangat mereka nantikan untuk bisa menambah jumlah penumpang yang mereka angkut. Kalau syarat perjalanan dipersulit, tentu penumpang juga akan berkurang." Kata Sigit.

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemhub) memprediksi sebanyak 80 juta orang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran tahun ini. Angka tersebut berdasarkan survei yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemhub.



Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR RI

"Saat ini operator transportasi umum mulai dari darat, laut, udara dan kereta api sudah menunjukkan perbaikan setelah aturan perjalanan diperlonggar. Saat mudik ini tentu sangat mereka nantikan untuk bisa menambah jumlah penumpang yang mereka angkut. Kalau syarat perjalanan dipersulit, tentu penumpang juga akan berkurang."



Aleg PKS Minta Perhelatan Event Internasional Tampilkan Kearifan Lokal yang **Religius**

KUTIPAN

Toriq sangat miris ketika aksi pawang hujan dipertontonkan pada perhelatan MotoGP kemarin. Menurutnya hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan Sosialisasi 4 Pilar yang dilakukan oleh MPR RI. Utamanya Pancasila Sila Pertama.

Tasikmalaya (26/03) —
Dihadapan komunitas Tukang Foto Priangan Timur, Anggota DPR RI Fraksi PKS mengingatkan agar nilai-nilai ketuhanan menjadi sumber etika dan spiritualitas dalam kehidupan berbangsa dan negara.

"Nilai-nilai agama/religius menjadi dasar etik kehidupan berbangsa dan bernegara. sehingga sangat jelas bahwa kebangsaan kita adalah kebangsaan yang berKetuhanan," jelas Toriq Hidayat.

Hal ini disampaikan saat melaksanakan kegiatan Sosialisasi 4 Pilar di daerah pemilihannya. Tepatnya di Aula Ibadurrohman, kecamatan

Indihiang kota Tasikmalaya pada hari Selasa 22 Maret 2022.

Toriq sangat miris ketika aksi pawang hujan dipertontonkan pada perhelatan MotoGP kemarin. Menurutnya hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan Sosialisasi 4 Pilar yang dilakukan oleh MPR RI. Utamanya Pancasila Sila Pertama.

"Sila pertama menegaskan tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti-Ketuhanan dan anti keagamaan. Tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang menghina dan menistakan agama. Sama halnya tidak boleh ada sikap

dan perbuatan yang mengerdilkan peran agama", jelasnya.

Menurut Toriq, Pemerintah berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran agar masyarakat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

"Oleh karenanya saya minta Pemerintah harus menjamin setiap perhelatan nasional dan internasional hanya menampilkan aksi seni budaya dari kearifan lokal dan tidak bertentangan dengan Pancasila, sila pertama," tutup Toriq.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi V DPR RI

Pemerintah berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran agar masyarakat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. "Oleh karenanya saya minta Pemerintah harus menjamin setiap perhelatan nasional dan internasional hanya menampilkan aksi seni budaya dari kearifan lokal dan tidak bertentangan dengan Pancasila, sila pertama"

RDP dengan Pertamina

Aleg PKS: Banyak Sekali Masalah Terjadi di Aceh!

● KUTIPAN

Jakarta (31/03) — Anggota Legislatif Komisi VI dari Fraksi PKS DPR RI, Rafli, menyampaikan pendapatnya terkait permasalahan yang terjadi di wilayah kerja Pertamina Aceh

dalam Rapat Komisi VI DPR RI dengan Pertamina di Ruang Rapat Komisi VI Gedung DPR RI pada Selasa (29/3/2022) sore.

"Saya ingin menyampaikan terkait tabung LPG Non-CSO. Setelah saya lihat di lokasi, tabung LPG Non-CSO yang berada di Aceh itu buatan tahun 70an. Saya dulu sudah pernah menyampaikan hal ini tetapi dianggap sepele, dianggap remeh. Ini harus ada kepastian. Sangat memprihatikan," ujar Rafli, legislator Fraksi PKS ini

juga menyinggung terkait pembangunan pertashop yang genar dilakukan oleh Pertamina. Program pertashop memiliki tujuan untuk mempermudah dan memperluas akses energi terutama BBM bagi masyarakat yang secara geologis jauh dari SPBU.

"Tujuan program pertashop ini bagus dan sangat membantu masyarakat. Tetapi, perlu dilihat kondisi di lapangan, kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan. Contohnya, jarak antara SPBU dan pertashop yang berdekatan. Ini menunjukkan program Pertamina tidak tepat sasaran. Kondisi seperti ini akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat," ungkap Anggota Legislatif dari Dapil Aceh I.

Sebelum menutup pendapatnya, ia juga mengingatkan Pertamina untuk tetap dan serius dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terlebih di waktu persiapan ramadhan seperti saat sekarang ini.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

**RAFLI**Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Nanggroe Aceh Darussalam I

"Tujuan program pertashop ini bagus dan sangat membantu masyarakat. Tetapi, perlu dilihat kondisi di lapangan, kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan. Contohnya, jarak antara SPBU dan pertashop yang berdekatan. Ini menunjukkan program Pertamina tidak tepat sasaran. Kondisi seperti ini akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat,"

Dr. Salim



“Kita terlatih berkorban dengan ekonomi dan waktu berharga yang kita miliki. Sekali lagi, tidak mungkin orang mencintai kita, kalau kita tak memiliki akhlak yang baik, dengan kesantunan dan ketawadhuan”

RDP dengan PLN, Aleg PKS Minta Oversupply Sistem Jawa Bali **Diimbangi** Infrastruktur Penggunaan

KUTIPAN

Jakarta (02/04) --- Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat dengan PT PLN menyampaikan agar penerapan gaya hidup dalam menggunakan peralatan berbasis listrik dalam kehidupan sehari-hari semakin masif, perlu ada sosialisasi penggunaan dan penyediaan alat-alatnya.

Menurut Nevi, Komisi VI sudah mendukung PT PLN untuk menghadapi dan mengatasi tantangan sistem kelistrikan Tahun 2022 terkait Oversupply pada sistem Jawa-Bali dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.

Dengan begitu, imbuh Nevi, perlu ada kemudahan masyarakat untuk memperoleh peralatan-peralatan yang mendorong ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai dan penggunaan kompor induksi yang merupakan peralatan yang digunakan dalam kehidupan

sehari-hari.

"Saya sangat mendukung kepada PLN agar terus mencari peluang pasar baru, seperti di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan serta kelautan melalui program electrifying agriculture dan electrifying marine. Ini merupakan sebuah terobosan teknologi yang akan mengurangi penggunaan energi berbasis fosil. Sehingga kondisi kejadian kelangkaan energi seperti solar dan mahalnya BBM lain seperti pertama kali etas dapat dihindari", tutur Nevi.

Seiring dengan kesimpulan Rapat, Legislator asal Sumatera Barat II ini juga meminta kepada PT PLN untuk memperhatikan calon investor dalam daftar penyedia terseleksi (DPT) PLN dalam pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada sistem kelistrikan Jawa, Sumatera, Kalimantan interkoneksi dan Sulawesi Bagian Selatan agar tidak Oversupply.

Politisi PKS ini menekankan agar terjadi keseimbangan pelayanan PLN dalam menyediakan kelistrikan baik rumah tangga maupun industri di Jawa-Bali dan non Jawa-bali. Dengan keseragaman pelayanan di seluruh wilayah Indonesia, masyarakat dapat berkesempatan yang sama dalam mengembangkan industri kecil dan menengah untuk berkembang ketika basis produksinya menggunakan listrik.

"Ketika PLN sebagai perusahaan negara yang merupakan penyedia listrik terbesar di Indonesia menjadi pelopor dalam ekosistem kelistrikan seperti kendaraan listrik (EV/electric vehicle) dan kompor induksi, maka akan



Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

"PLN mesti melakukan peningkatan demand, efisiensi, perbaikan bisnis proses, tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen hutang untuk memperkuat keuangan perusahaan sehingga eksistensi PLN di negara ini menjadi entitas yang dapat memberikan sumbangsih besar kepada negara dan rakyatnya"

terjadi penciptaan permintaan (demand creation) yang secara bersamaan dapat sebagai pengalihan konsumsi energi berbasis impor menjadi energi berbasis domestik. Untuk itu PLN mesti melakukan peningkatan demand, efisiensi, perbaikan bisnis proses, tata

kelola perusahaan yang baik dan manajemen hutang untuk memperkuat keuangan perusahaan sehingga eksistensi PLN di negara ini menjadi entitas yang dapat memberikan sumbangsih besar kepada negara dan rakyatnya", tutup Nevi Zuairina

Aleg PKS: Pemerintah Harus Jamin Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Puasa dan Lebaran

KUTIPAN

Jakarta (01/04) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman mengingatkan Pemerintah untuk benar-benar menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, dengan harga yang terjangkau, khususnya jelang puasa dan lebaran.

Menurut Mahfudz, saat ini kita dalam masa pemulihan dalam sektor ekonomi, tentu kemampuan keuangan masyarakat masih belum memadai.

"Jadi kita harus bantu masyarakat, dengan mejaika ketersediaan bahan pokok dengan harga yang kalau bisa murah," ucap Anggota Komisi VI ini.

Mahfudz menambahkan, pihaknya menyaksikan silih berganti kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat, dari Kedelai, Telur, Gula, dan yang masih baru saja terjadi. Kelangkaan minyak goreng.

"Masyarakat sampai antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan minyak goreng 1 atau 2 liter. Ini tentu Ironi, di negara penghasil CPO," ujar

Mahfudz.

Pemerintah, imbuhnya, juga kewalahan dalam menangani persoalan ini, kebijakan tidak berjalan baik di lapangan, yang sampai saat ini masih belum jelas juga apa penyebab utama kelangkaan minyak goreng.

"Berkulan-bulan kita dihadapkan dengan keluhan pedagang dan masyarakat bahwa minyak goreng sulit ditemui dipasaran," pungkasnya.

ini tentu menjatuhkan wibawa negara dalam hal ini pemerintah dipublik.

"Saya agak kurang bisa menerima alasan dan argument pemerintah, karena langkah mitigasi dengan beragam

regulasi tidak jalan," lanjut Anggota PKS Dapil Kota Depok dan Kota Bekasi ini.

"Ini saatnya Pemerintah membuktikan kemampuannya menjaga ketersediaan bahan pokok menjelang puasa Ramadhan, yang masyarakat akan mengkonsumsi lebih banyak. Jangan lagi ada kelangkaan, khususnya yang harus jadi perhatian adalah ketersediaan daging sapi dan ayam. Yang saat ini sudah mulai naik harganya, bahkan harga daging sapi sudah mencapai 150 ribu rupiah per kilogram," ujar Mahfudz.

Pemerintah, kata Mahfudz, harus serius mengendalikan pasokan dan harga, jangan sampai lengah.

"Siapkan Operasi Pasar jika diperlukan, khususnya di wilayah yang mengalami kelangkaan. Kita tidak boleh main-main!," tegas Bendahara Umum DPP PKS.

Mahfudz menyampaikan dengan tegas bahwa peran regulasi dan pengawasan harus berjalan seiring sejalan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos

Anggota Komisi VI DPR RI

"Ini saatnya Pemerintah membuktikan kemampuannya menjaga ketersediaan bahan pokok menjelang puasa Ramadhan, yang masyarakat akan mengkonsumsi lebih banyak. Jangan lagi ada kelangkaan, khususnya yang harus jadi perhatian adalah ketersediaan daging sapi dan ayam. Yang saat ini sudah mulai naik harganya, bahkan harga daging sapi sudah mencapai 150 ribu rupiah per kilogram"



Politisi PKS : Pemerintah Gagal Kendalikan Harga Kebutuhan Pokok

KUTIPAN

Jakarta (30/03) --- Gejolak harga pangan yang berlarut-larut, bahkan terus naik mendekati Ramadhan, makin menekan kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan terjadi pada harga sejumlah bahan kebutuhan pokok terutama minyak goreng, kedelai, gula, tepung terigu, telur dan daging ayam, daging sapi, dan cabai.

Gejolak harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri merupakan persoalan yang selalu berulang setiap tahun, seharusnya bisa diantisipasi sejak dini.

Amin Ak menilai, pemerintah gagal mengendalikan gejolak harga sejumlah komoditas pangan padahal sinyal kenaikan telah muncul sejak November 2021 lalu.

"Pemerintah jangan lagi menggunakan cara-cara biasa dalam mengendalikan gejolak harga pangan yang sudah berlarut-larut dalam beberapa bulan ini," tegas Amin.

Secara kelembagaan, pemerintah punya banyak lembaga yang mengatur

pangan. Selain kementerian perdagangan dan kementerian pertanian, ada Badan Pangan Nasional, Bulog, juga kita punya BUMN Pangan.

"Namun persoalan klasik seperti tata niaga, rantai pasokan, dan rantai distribusi sampai saat ini belum juga teratasi. Ini artinya urusan pangan tidak bisa lagi diatasi dengan cara biasa-biasa saja. Harus dituntaskan dari akar persoalannya," kata Amin.

Amin juga meminta pemerintah untuk menunda kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen agar tidak semakin menekan daya beli masyarakat. Ditengah belum pulihnya pendapatan

masyarakat, terutama kelas menengah bawah, maka kenaikan PPN akan makin memberatkan.

Pemerintah juga dinilai tidak berdaya untuk dengan tegas mengatur para importir hingga pelaku usaha lainnya. Regulasinya lengkap, lembaganya juga banyak, maka yang dibutuhkan adalah kemauan politik dan sikap tegas untuk menegakkan regulasi yang ada.

Keterlambatan antisipasi dan ketidaktegasan menegakkan aturan terlihat jelas pada kasus lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng. Berbagai instrumen aturan seperti kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) menjadi tidak efektif karena pemerintah kalah dari eksportir CPO.

Lebih lanjut Amin mengungkapkan, kenaikan harga bahan kebutuhan pokok disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor-faktor eksternal yang menyebabkan lonjakan harga pangan adalah perubahan iklim dan perang Rusia - Ukraina.

Lonjakan harga kedelai misalnya, dipengaruhi oleh



AMIN AK, M.M.

Anggota Komisi VI DPR RI

"Pemerintah gagal mengendalikan gejolak harga sejumlah komoditas pangan padahal sinyal kenaikan telah muncul sejak November 2021 lalu. Pemerintah jangan lagi menggunakan cara-cara biasa dalam mengendalikan gejolak harga pangan yang sudah berlarut-larut dalam beberapa bulan ini"

perubahan iklim yang menyebabkan produksi di sejumlah produsen utama seperti Brasil menurun tajam. Akibatnya, terjadi persaingan permintaan dari negara-negara konsumen besar seperti halnya

Indonesia. Kedelai impor selama ini memenuhi 90% kebutuhan bahan baku tempe dan tahu.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Wakil Ketua FPKS Tolak Kenaikan Pertamina karena Tambah Beban Rakyat

KUTIPAN

Jakarta (01/04) --- Menyikapi wacana kenaikan harga BBM jenis Pertamina, yang diberitakan telah mendapat lampu merah dari DPR, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto menyatakan ketidaksetujuannya.

Komisi VII sendiri tidak pernah membahas soal kenaikan harga Pertamina ini. Pernah dalam FGD diangkat Pertamina soal ini, namun secara umum disikapi dingin oleh anggota yang hadir.

Mulyanto, minta pemerintah konsisten dalam mengambil kebijakan terkait harga BBM dalam negeri. Selain itu sudah seharusnya kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat yang masih belum pulih benar karena diterpa pandemi Covid-19 atau kalau dalam istilah ibu meneku, agar tidak menimbulkan market shock.

"Soal konsistensi ini penting agar kebijakan

harus konsisten terkait kebijakan BBM jenis umum, yang harganya bergerak sesuai mekanisme pasar. Biar pasar yang menentukan harga itu melalui kompetisi yang adil antara Pertamina dan swasta lainnya, sehingga terbentuk harga yang fair," tandas Mulyanto.

Selain itu, Kenaikan Pertamina secara langsung juga akan menekan Peralite, karena dapat diperkirakan pengguna Pertamina akan beralih ke Peralite. Karena Selisih harga yg cukup lebar antara Pertamina dan Peralite akan mendorong terjadinya hal tersebut.

"Seharusnya Pemerintah segera membayar dana kompensasi bagi Pertamina yang selama ini tertunggak sebesar 100 triliun rupiah. Ini cara yg elegan untuk menyelamatkan Pertamina," ujar Mulyanto mengakhiri.

Pemerintah mudah dipahami dan mendapat dukungan publik. Contohnya terkait dengan harga Pertamina. Di awal-awal pandemi saat harga migas dunia anjlok pada titik terendah, pemerintah tidak menurunkan harga Pertamina.

Sekarang, saat harga migas naik, pemerintah segera mewacanakan untuk menaikkan harga Pertamina. Ini kan tidak konsisten. Masyarakat pada posisi yang tidak diuntungkan," terang Mulyanto.

Akibatnya masyarakat tidak dapat membedakan mana BBM jenis umum, mana yg BBM khusus penugasan dan mana BBM bersubsidi. Karena semua harga BBM diatur pemerintah.

"Ke depan pemerintah

**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Anggota Komisi VII DPR RI

"Soal konsistensi ini penting agar kebijakan Pemerintah mudah dipahami dan mendapat dukungan publik. Contohnya terkait dengan harga Pertamina. Di awal-awal pandemi saat harga migas dunia anjlok pada titik terendah, pemerintah tidak menurunkan harga Pertamina. Sekarang, saat harga migas naik, pemerintah segera mewacanakan untuk menaikkan harga Pertamina. Ini kan tidak konsisten. Masyarakat pada posisi yang tidak diuntungkan"



Aleg PKS Minta BRIN Efektif dalam Alokasi Anggaran, Agar Riset Nasional Mampu Jawab Tantangan Global

KUTIPAN

Jakarta (27/03) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari, menekankan pentingnya pengembangan teknologi dalam menjawab tantangan-tantangan di masyarakat yang makin kompleks dalam konteks global.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BRIN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (23/03).

"PKS menganggap bahwa riset merupakan pilar penting dalam kemajuan Bangsa Kita. Kita harus menjadikan pengembangan teknologi berbasis pada kebutuhan masyarakat, sehingga pengembangan teknologi lebih membumi dan bermanfaat secara langsung kepada masyarakat", ujar Diah.

Guna mewujudkan hal tersebut, imbuh Diah, diperlukan efektivitas dalam penggunaan dan alokasi anggaran BRIN.

"Penyerapan anggaran harus menjadi prioritas di

lapangan, karena menjadi cerminan performa dalam mengesekusi perencanaan yang telah dibuat. Harus dievaluasi, jangan sampai kegagalan dalam perencanaan menjadi faktor yang membuat penyerapan rendah", jelas Anggota DPR dari Dapil Jawa Barat ini.

Selain itu, menurut Diah, diperlukan adanya koordinasi antara BRIN pusat dengan BRIN daerah, sehingga mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan masyarakat yang punya keterampilan khusus dalam membuat suatu kreativitas inovasi dalam teknologi.

"BRIN dapat memberikan support dan pengarahan dalam

proses pengembangan maupun penyempurnaan dari inovasi masyarakat tersebut, dan secara bersamaan BRIN dapat melakukan sosialisasi lebih luas kepada masyarakat", ungkapnya.

Tak hanya itu, terdapat hal lain yang disampaikan Diah yakni mengenai tantangan dari proses produksi.

"Proses-proses riset di Indonesia sudah sangat banyak, namun kita sangat kesulitan untuk direalisasikan dalam bentuk produk. Sehingga kebermanfaatannya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat", lanjutnya.

Secara khusus, ia pun memberikan support pada pengembangan Pesawat N219 untuk dapat mengembalikan kebanggaan terhadap kemajuan dari industri Dirgantara kita.

"Dalam pengembangan SDM Bangsa, teh diah menegaskan pentingnya kejelasan dari tugas dan fungsi antara BRIN dengan Kemdikbudristek sehingga terjadi proses integrasi yang lebih baik", tutupnya.



Dipl.Ing. Hj. **DAH**
NURWITASARI, M. I. POL.
Anggota Komisi VII DPR RI

"Penyerapan anggaran harus menjadi prioritas di lapangan, karena menjadi cerminan performa dalam mengesekusi perencanaan yang telah dibuat. Harus dievaluasi, jangan sampai kegagalan dalam perencanaan menjadi faktor yang membuat penyerapan rendah",

Usulkan Biaya Haji Rp42 Juta, Aleg PKS: **Sesuaikan** dengan Kemampuan Masyarakat saat Pandemi

KUTIPAN

Medan (18/03) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis menilai usulan Kementerian Agama terkait Biaya Perjalanan Haji Tahun 2022 dirasa masih sangat tinggi dan seharusnya bisa dikurangi.

"Biaya Perjalanan Haji dirasa masih terlalu tinggi bagi masyarakat kita, khususnya di tengah Pandemi Covid-19 ini yang saya rasa belum sepenuhnya pulih ekonomi negara kita. Usulan dari Kementerian Agama itu saya rasa masih bisa untuk dikurangkan lagi, peluang untuk dikurangkannya biaya haji itu masih terbuka pasalnya seperti karantina, tes PCR atau antigen juga sudah tidak pakai lagi untuk masuk wilayah Saudi bagi yang sudah Vaksinasi 2 kali atau Booster 3 kali", ujar Iskan.

Politisi asal Sibuhuan ini menambahkan bahwa Kementerian Agama harus segera evaluasi kembali terkait

Biaya Perjalanan Haji Tahun 2022 ini.

"Saya rasa Kementerian Agama selaku pemangku Kebijakan untuk Biaya Perjalanan Haji dapat segera evaluasi kembali karna usulan biaya sebesar Rp 42 juta itu masih bisa kita pangkas lagi. Untuk itu saya meminta kepada pemerintah RI khususnya Kementerian Agama agar dapat melihat secara langsung realitas di lapangan dalam hal ini Arab Saudi. Jika sudah mendapat gambaran maka perumusan biaya haji bisa dibahas kembali. Jika bisa ditekan Biaya Perjalanan Haji lebih murah lagi tentunya akan lebih baik dan meringankan

calon jamaah haji, dengan berbagai efisiensi namun harus tetap menjaga kualitas layanan", tegas Iskan.

Lebih lanjut Iskan juga menambahkan bahwa Kementerian Agama harus dapat mempertimbangkan soal diterkannya kembali pengurangan biaya haji tahun 2022.

"Saya minta agar Kementerian Agama dapat mempertimbangkan kembali soal pengurangan Biaya Haji tahun 2022 ini. Pemasalannya estimasi biaya sudah tidak ada lagi Biaya Karantina, Biaya Tes PCR maupun Biaya antigen. Saya berharap biaya perjalanan Haji tahun ini bisa sama diangka Biaya perjalanan Haji sebelumnya, kalau kita bisa pangkas kembali dibawah angka 40 juta saya rasa sangat membantu dan memudahkan bagi calon jamaah Haji Masyarakat Indonesia dan saya akan memperjuangkan Biaya pelaksanaan Haji yang disetor jamaah dibawah 40 juta", pungkas Iskan mengakhiri.



H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Dapil Sumatera Utara II

Saya rasa Kementerian Agama selaku pemangku Kebijakan untuk Biaya Perjalanan Haji dapat segera evaluasi kembali karna usulan biaya sebesar Rp 42 juta itu masih bisa kita pangkas lagi.

Untuk itu saya meminta kepada pemerintah RI khususnya Kementerian Agama agar dapat melihat secara langsung realitas di lapangan dalam hal ini Arab Saudi

Politisi PKS: Dana Haji Tak Boleh Dikelola Pihak Lain Di Luar Umat Islam!

KUTIPAN

Jakarta (22/03) --- Panitia Seleksi (Pansel) BPKH tengah menyaring sejumlah kandidat untuk dipilih sebagai anggota badan pelaksana BPKH dan Anggota Dewan Pengawas BPKH masa bakti 2022-2027.

Dari ratusan kandidat, Pansel BPKH hanya akan menentukan 14 calon anggota badan pelaksana BPKH dan 10 anggota dewan pengawas yang diusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan.

Selanjutnya, Presiden akan mengajukan nama calon anggota dewan pengawas dari unsur masyarakat kepada DPR untuk dipilih.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menaruh harapan besar pada kinerja BPKH di masa mendatang. Bukhori mengingatkan BPKH supaya berhati-hati dalam membenamkan investasi keuangan haji di Arab Saudi.

Bukhori meminta asas pengelolaan keuangan haji yang berprinsip syariah dan manfaat bagi umat Islam ditegakan secara konsisten dan bertanggung

jawab.

"Mengingat masa bakti Anggota BPKH periode 2017-2022 akan segera berakhir dalam waktu dekat, ada beberapa isu yang perlu menjadi perhatian secara berkelanjutan sekaligus rekomendasi bagi pengurusan BPKH mendatang. Salah satunya adalah terkait tata kelola investasi dana haji di Arab Saudi," ucap Bukhori di Jakarta, Senin (21/03/2022).

Legislator Dapil Jawa Tengah 1 ini mengatakan, diluar aspek teknis, tata kelola investasi keuangan haji perlu memperhatikan dua unsur fundamental, yaitu aspek etika dan orientasi.

Terkait aspek etika, Bukhori menegaskan, dana haji merupakan dana titipan jemaah yang peruntukannya adalah

bagi kepentingan umat Islam sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 3 UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengamanatkan tujuan pengelolaan dana haji adalah guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPH, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

"Dana yang diamanatkan calon jemaah haji kepada BPKH merupakan dana yang dipercayakan oleh umat Islam kepada BPKH sebagai wakil yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dana titipan jemaah ini secara mutlak tidak boleh disentuh, dibagi, apalagi diserahkan penguasaannya kepada pihak lain di luar umat Islam karena dikhawatirkan menyimpang dari tujuannya," ucap Bukhori di Jakarta, Senin (21/3/2022).

Ketua DPP PKS ini menambahkan, dari segi orientasi, tujuan dari pengelolaan keuangan haji harus dijaga secara lurus dan akuntabel karena dana yang diinvestasikan menyimpan kepentingan umat Islam.

**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Dana yang diamanatkan calon jemaah haji kepada BPKH merupakan dana yang dipercayakan oleh umat Islam kepada BPKH sebagai wakil yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dana titipan jemaah ini secara mutlak tidak boleh disentuh, dibagi, apalagi diserahkan penguasaannya kepada pihak lain di luar umat Islam karena dikhawatirkan menyimpang dari tujuannya

"Dana ini bukan berasal dari APBN, melainkan murni uang rakyat, uang titipan milik umat Islam Indonesia. Karena itu, kelolanya tidak boleh sebatas menajar profit-oriented dengan mengabaikan aspek religiusitas di dalamnya. Sebab ada nilai-nilai (value)

keumatan yang mesti dijaga betul sehingga orientasi dari pengelolaan dana ini seyogyanya bukan untuk hal lain, kecuali untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat Islam," tegasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Haji 2022 Dibuka bagi Indonesia,

HNW: Perjuangkan Tambah Kuota dengan Biaya Tak Memberatkan

KUTIPAN

Jakarta (25/03) --- Anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR-RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid menyambut baik kabar yang disampaikan Arab Saudi oleh Menteri Agama bahwa pelaksanaan haji tahun 2022 Masehi atau 1443 Hijriah akan dibuka bagi jemaah dari luar Saudi, termasuk dari Indonesia.

HNW sapaan akrabnya meminta agar Kementerian Agama dapat mempersiapkan keberangkatan jemaah Indonesia dengan maksimal.

Pemerintah, kata HNW harus mempersiapkan calon jemaah yang akan berangkat secara adil, mempersiapkan dari sisi kesehatan calon jemaah, memperjuangkan kuota terbaik bagi jemaah Indonesia yang sangat antusias ke tanah suci tapi sudah dua musim tidak bisa berangkat karena pandemi covid-19, dan memastikan agar biaya

penyelenggaraan ibadah haji lebih efisien dan tidak memberatkan calon jemaah haji.

"Alhamdulillah, kami turut bersyukur mendengar kabar pembukaan haji tahun ini juga untuk jemaah haji dari Indonesia. Penting Kemenag memperjuangkan agar Indonesia bisa mendapatkan kuota terbaik, sehingga akan lebih banyak calon Jemaah haji yang bisa berangkat kembali berhaji mulai tahun ini. Mengingat daftar tunggu yang semakin panjang akibat dua musim jemaah haji dari calon haji dari Indonesia tidak ada

yang bisa diberangkatkan karena covid-19 kecuali jumlah yang sangat sedikit dari WNI yang mukim di Arab Saudi. Selain itu kami pastikan bahwa Fraksi PKS dan komisi VIII di DPR akan terus mengawal persiapan haji serta mengoreksi usulan dari Kemenag soal biaya perjalanan ibadah haji agar tidak memberatkan calon jemaah haji," disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/03/2022).

HNW menjelaskan, usulan awal Menag yang disampaikan dalam raker dengan DPR (20/02/2022) bahwa biaya haji reguler akan naik menjadi Rp 45 juta belum menjadi keputusan dan masih mendapat penolakan baik dari Komisi VIII DPR-RI maupun masyarakat luas.

Bahkan, lanjutnya, dalam pembahasan terakhir komisi VIII DPR dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (21/03/2022), BPKH mengaku belum menerima rincian komponen biaya haji yang diusulkan oleh Menag. Sehingga belum bisa ditentukan berapa biaya haji tahun 2022. Dan Fraksi PKS



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

“Penting Kemenag memperjuangkan agar Indonesia bisa mendapatkan kuota terbaik, sehingga akan lebih banyak calon Jemaah haji yang bisa berangkat kembali berhaji mulai tahun ini. Mengingat daftar tunggu yang semakin panjang akibat dua musim jemaah haji dari calon haji dari Indonesia tidak ada yang bisa diberangkatkan karena covid-19 kecuali jumlah yang sangat sedikit dari WNI yang mukim di Arab Saudi”

sudah sampaikan langsung agar koordinasi antara BPKH dengan Dirjen Haji dan Umrah di Kemenag dimaksimalkan supaya segera bisa disepakati

usulan biaya perjalanan haji yang tidak memberatkan calon Jemaah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



- Penyesuaian tarif tol telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dengan perubahan terakhir pada PP Nomor 17 Tahun 2021.

Per Tanggal 26 Februari Tarif Tol Dalam Kota Naik **PKS: BATALKAN KENAIKAN TARIF TOL**



Penyesuaian tarif tol dilakukan untuk ruas

- Cawang-Tomang-Pluit
- Cawang-Tanjung Priok- Ancol Timur- Jembatan Tiga/Pluit



“Fraksi PKS mendesak agar Pemerintah mengatur dulu SPM Jalan Tol melalui Peraturan Pemerintah sesuai dengan UU Jalan baru kemudian memutuskan melakukan penyesuaian tarif Jalan Tol.

H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
(Anggota Komisi V DPR RI FKPS)

■ Daftar Kenaikan Tarif Tol Dari Januari 2022 ke Februari 2022

- Golongan 1 **Rp 10.000 → Rp 10.500**
- Golongan 2 & 3 **Rp 15.000 → Rp 15.500**
- Golongan 4 & 5 **Rp 17.000 → Rp 17.500**

Desain : Aditya Angga

Usai MoU Indonesia-Malaysia, Aleg PKS akan Kawal Implementasi Perlindungan PMI

KUTIPAN

Jakarta (02/04) --- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyambut baik pembaruan MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) antara Indonesia dan Malaysia.

Kurniasih mengatakan, perlindungan PMI adalah harga mati bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan PMI yang terbukti telah memberikan manfaat besar bagi negara.

"Terbitnya perlindungan PMI di Malaysia setelah mandek sejak 2016 adalah langkah baik, sebab perlindungan PMI adalah sebuah kewajiban negara dan pemerintah wajib mengusahakannya. Ini memang bagian dari penunaian tanggung jawab pemerintah setelah lama terbengkalai," sebut Kurniasih dalam keterangannya, Sabtu (02/04).

Kurniasih melanjutkan tahap selanjutnya usai MoU ini adalah mengupayakan kedua

belah pihak melakukan implementasi terhadap aturan perlindungan PMI di negara masing-masing.

"Harapannya agar ada kepastian hukum terhadap pelaksanaan MoU Indonesia-Malaysia melalui aturan teknis. Adanya nota kesepahaman bermakna kedua belah pihak saling membutuhkan dan sejajar. Kita harapkan implementasi MoU ini di lapangan memiliki kekuatan hukum di kedua negara untuk perlindungan maksimal terhadap PMI," sebut Kurniasih.

Kurniasih mengatakan beberapa peraturan tambahan yang ada di MoU ini adalah pendataan one channel system bagi semua PMI yang

mencakup lokasi bekerja, identitas majikan, dan latar belakang majikan.

Kemudian ada kenaikan upah minimum dari Rp 4 juta menjadi Rp 5 juta. Larangan terhadap majikan untuk menahan paspor atau dokumen pribadi milik pekerja migran dan mewajibkan pemerintah Malaysia untuk memastikan larangan ini dipatuhi.

Mewajibkan majikan memberikan hak pekerja untuk menggunakan telepon atau berkomunikasi kepada keluarga atau perwakilan RI di Malaysia. Menyatakan endorsement kontrak kerja oleh perwakilan RI di Malaysia untuk pembuatan atau perpanjangan visa kerja. Serta proses penempatan pekerja hanya bisa dilakukan oleh agensi yang terdaftar di pemerintah Malaysia dan perwakilan RI.

"Ada klausul agar pemerintah memastikan larangan menahan paspor dipatuhi, ini harus ada tindaklanjutnya agar ada kepastian hukum dalam pelaksanaan di lapangan yang sudah menjadi kewajiban kedua negara," terang Kurniasih.



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

"Sosialisasi ini harus maksimal dan benar-benar dipahami oleh teman-teman PMI sehingga mereka paham apa yang menjadi hak mereka dan apa kewajibannya. DPR akan mengawal agar perlindungan PMI di Malaysia benar-benar terealisasi

Kurniasih berharap PMI yang akan bekerja dan tengah bekerja di Malaysia mendapat kepastian perlindungan yang maksimal. Proses aturan-aturan terbaru terkait MoU ini juga harus segera disosialisasikan agar PMI mengerti hak dan kewajiban mereka usai kesepakatan kedua negara.

"Sosialisasi ini harus maksimal dan benar-benar dipahami oleh teman-teman PMI sehingga mereka paham apa yang menjadi hak mereka dan apa kewajibannya. DPR akan mengawal agar perlindungan PMI di Malaysia benar-benar terealisasi," kata Kurniasih.



Wacana Mudik Harus Tes Antigen dan PCR

Aleg PKS: Situasi Terkini Covid-19 Sudah Membaik

KUTIPAN

Jaksrta (26/03) - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani, mengkritik wacana kebijakan yang digulirkan Pemerintah terkait pengaturan perjalanan mudik pada cuti bersama Idul Fitri tahun ini.

"Berdasar isu yang berkembang, nantinya terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang akan melakukan mudik hari raya Idul Fitri, termasuk di antaranya, pemudik yang baru mendapatkan dua dosis vaksin Covid-19 diwajibkan menjalani Rapid Tes Antigen sebelum melaksanakan mudik. Sedangkan pemudik yang baru mendapatkan satu dosis vaksin dosis 1 Covid-19 diwajibkan menjalani tes PCR sebelum mudik", ungkap Netty dalam keterangan pers kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (26/03).

Menurutnya, wacana aturan terbaru yang masih mengharuskan pemudik untuk tes antigen dan/atau PCR terkesan mengada-ada dan tidak sesuai situasi terkini.

"Aturan terkait yang

terakhir, yaitu SE Satgas Covid 19 No.11 Tahun 2022 tertanggal 8 Maret 2022 menyatakan bahwa Pelaku Perjalanan Dalam Negeri yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak diwajibkan menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen", ungkap Netty.

Sehingga, imbuh Netty, aturan mudik yang akan dikeluarkan Pemerintah justru memperlihatkan suatu kemunduran atas situasi Covid-19 yang ada saat ini. Padahal, menurutnya, situasi saat ini sudah membaik.

"Jumlah kasus harian Covid-19 saat ini hanya berkisar sekitar 6 ribu kasus per hari, sehingga sudah jauh lebih rendah daripada puncak gelombang kedua Covid-19

pada bulan Februari 2022 yang berada pada kisaran angka 60 ribu kasus per hari. Apalagi para ahli dari WHO pada bulan Januari 2022 lalu telah menyatakan bahwa booster vaksin tidak diperlukan bagi orang dewasa dan anak yang sehat", tegas Anggota DPR dari Dapil Jawa Barat tersebut.

Berdasar pertimbangan itu, lanjutnya, Fraksi PKS meminta Pemerintah memperhatikan situasi terkini dan peraturan yang sudah ada sebelumnya untuk mempermudah masyarakat yang ingin mudik.

"F-PKS mendorong Pemerintah tidak membuat aturan yang berlebihan serta lebih mengutamakan membuat kebijakan sesuai data dan fakta yang ada di lapangan. Jangan sampai masyarakat menangkap kesan bahwa aturan mudik tersebut dibuat sebagai alasan untuk menghabiskan stok alat pengesanan antigen atau PCR saja", tutupnya.

**Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

"F-PKS mendorong Pemerintah tidak membuat aturan yang berlebihan serta lebih mengutamakan membuat kebijakan sesuai data dan fakta yang ada di lapangan. Jangan sampai masyarakat menangkap kesan bahwa aturan mudik tersebut dibuat sebagai alasan untuk menghabiskan stok alat pengesanan antigen atau PCR saja"

Rapat dengan Pemerintah, DPR **Sesalkan** Permasalahan Terkait DAK Yang Terus Terulang

KUTIPAN

Jakarta (18/03) --- Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan rapat dengan Dirjen Anggaran & Dirjen Keuangan Kementerian Keuangan,

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/ Bappenas dan Dirjen Bina Keuangan Daerah & Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk membahas peneraahan BAKN terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait tindak lanjut dan solusi permasalahan Dana Alokasi Khusus (DAK). Rapat ini diselenggarakan di Jakarta pada Rabu (16/03/2022).

Dalam rapat ini, Wakil Ketua BAKN, Anis Byarwati, menyampaikan pandangannya. Pertama, Anis mengingatkan bahwa sejak digulirkannya Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) termasuk DAK yaitu tahun 2001 hingga 2022 saat ini, permasalahan yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan TKDD masih sama. Permasalahannya

terjadi pada tahun 2021 seperti keterlambatan juknis, ternyata masih sama dengan puluhan tahun lalu.

"Jika kita perhatikan berbagai penelitian atau berbagai informasi yang didapatkan dari kunjungan-kunjungan kerja BAKN, kita menemukan permasalahan yang sama. Tidak bergerak," kata Anis.

Anis mengungkapkan penelitian yang dilakukan oleh BAPPENAS pada tahun 2011 yang sudah secara khusus menelaah tentang DAK.

Penelitian tersebut mengungkap kelemahan DAK termasuk apa saja poin-poin yang menjadikan DAK tidak efektif serta rekomendasinya. Temuan BAKN pada hari ini, ternyata sudah ditemukan oleh penelitian BAPPENAS pada tahun 2011. Salah satunya

tentang definisi DAK yang sebetulnya ditujukan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, namun dalam pelaksanaannya bergeser.

"Definisi yang ambigu ini, ternyata sudah ditemukan dalam penelitian BAPPENAS tahun 2011. Dan sekarang, permasalahan yang ditemukan juga masih sama," tutur Anis.

Anis pun menyayangkan persoalan sama yang telah terjadi berpuh tahun, hingga saat ini belum mengarah kepada solusinya.

"Kami berharap dengan BAKN menelaah secara khusus, DAK ini bisa diperbaiki," ucapnya.

Terkait dengan komposisi TKDD, DAK dengan alokasi anggaran 7% terhitung paling kecil dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang alokasi anggarannya diatas 10%.

Namun, Anggota Komisi XI DPR RI ini melihat permasalahan sebenarnya bukan tentang besar atau kecilnya nilai anggaran akan tetapi



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si

Wakil Ketua BAKN DPR RI

"Tingginya ekspektasi daerah untuk mendapatkan TKDD yang sudah terjadi sejak lama. Hal ini disebabkan karena ketergantungan daerah kepada pusat untuk membangun daerahnya. Hampir seluruh daerah hanya memiliki porsi PAD tidak lebih dari 20% untuk pembangunan daerahnya, sementara 80% anggaran daerah menggantungkan diri kepada TKDD termasuk didalamnya DAK.

bagaimana tata kelolanya.

Anis juga menegaskan bahwa penggunaan DAK yang benar-benar sesuai dengan tujuan peruntukannya akan tetapi

kelolanya, menjadi masalah di daerah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Softbank Hengkang dari Wacana Pembangunan IKN, Aleg PKS: Bagaimana dengan Investor Lain?

KUTIPAN

Mataram (22/03) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Junaidi Auly menanggapi isu Softbank selaku salah satu investor utama dalam misi pembangunan IKN yang mengundurkan diri dan menyatakan batal melakukan investasi.

Dengan kata lain, imbu Junaidi, wacana pembangunan IKN baru saja kehilangan dana sebesar US\$ 100 Miliar atau senilai Rp.1430 Triliun. Sebadai gantinya, Softbank akan tetap menanamkan modalnya guna mendukung perusahaan start-up di Indonesia.

"Keputusan Softbank batal berinvestasi untuk pembangunan IKN seharusnya sudah diwaspadai sebelumnya. Badai pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak Tahun 2020 dengan segala ketidakpastian yang mengiringinya membuat investor semakin berhati-hati untuk menanamkan modalnya, terlebih untuk pembangunan yang tergolong mega proyek

seperti pembangunan Ibu Kota Negara," jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Setelah kehilangan Softbank sebagai mitra, imbuhnya, bukanlah hal yang tidak mungkin bahwa investor lainnya juga akan mengambil keputusan yang sama.

"Berkaca dari negara serumpun, Malaysia, negara ini sudah mengusung kebijakan pembangunan kota dengan konsep Smart Forest City, layaknya konsep Ibukota Negara Nusantara yang dirancang oleh pemerintah. Malaysia telah menggagas dan merealisasikan kebijakan ini di Wilayah Iskandar sejak Tahun 2014," ujar Junaidi.

Namun, lanjutnya, aktivitas pembangunan ini mengalami perlambatan dan suspensi sejak pandemi Covid-19 melanda. Hal ini dikarenakan investor utama yang berasal dari China menarik diri dari program ini. Kondisi pandemi Covid-19 yang disertai dengan ketidakstabilan perpolitikan Malaysia menjadi alasan dibalikinya.

"Sayangnya, kondisi Malaysia itu saat ini sedang dihadapi Indonesia. Kondisi pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir serta menguaknya isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan yang mual pro dan kontra dinilai menjadi salah satu faktor yang menjadikannya sebagai masalah politik yang dihadapi Indonesia di awal Tahun 2022 ini," pungkasnya.

Faktor ini, kata Junaidi, berpotensi menjadi pertimbangan bagi investor asing yang menanamkan modalnya untuk pembangunan IKN.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

Pemerintah perlu segera menyiapkan skenario lain mengingat salah satu mitra kerja sama untuk pembangunan ibu kota negara adalah China yang menyertai Abu Dhabi. Pemerintah harus menepati janjinya bahwa pembangunan IKN tidak boleh membebani APBN,"



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif Atraktif Substantif

1443 H

رمضان Ramadhan

Bulan **Berbagi** dan **Melayani**

Gerakan Berbagi
2 JUTA PAKET
SAHUR & TAKJIL

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI





Hadiri BK Award DPRD Jabar 2021, Habib Aboe: Keberadaan BK Harus Tingkatkan Public Trust Lembaga Legislatif

KUTIPAN

Bandung (19/03) --- Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Aboe Bakar Al Habsy mengikuti acara Badan Kehormatan (BK) Award Jawa Barat 2021 yang digelar di Intercontinental Hotel Bandung pada Kamis, (17/03/2022) malam.

Menurutnya, keberadaan Badan Kehormatan (BK) ini bertugas sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD untuk menjaga kehormatan para wakil rakyat, sehingga pada akhirnya dapat dipercaya oleh rakyat.

"BK ini memiliki peran penting, yaitu mengawal dan menjaga para anggota DPRD agar melaksanakan tugasnya dengan baik. BK juga harus memastikan bahwa setiap anggota DPRD akan menjaga marwah dan martabatnya sebagai wakil rakyat," ucap politisi senior Partai Keadilan Sejahtera ini.

Habib Aboe, begitu ia akrab disapa, menjelaskan bahwa terdapat temuan bahwa tak jarang anggota DPRD yang masuk kantor hanya sekadar mengisi absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain. Keadaan ini tentu akan merusak citra lembaga legislative di mata publik. Sehingga, keberadaan BK ini berawal dari sikap evaluatif dan sikap korektif.

"Badan Kehormatan ini juga bertugas meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode

Etik DPRD. Tentu tugas ini tidak mudah, karena harus mengawasi, bahkan terkadang mengadili rekan sejawat sendiri. Disinilah tantangan yang harus dijawab. Kita harus menunjukkan bahwa BK memiliki kompetensi untuk mengawal pemenuhan etik dan moral para anggota dewan," ujar Habib Aboe.

Dengan semua fungsi dan tugas yang dimiliki oleh Badan Kehormatan ini, Legislator asal Kalimantan Selatan ini menyatakan kehadiran BK ini memiliki peran penting untuk meningkatkan public trust atau kepercayaan masyarakat terhadap anggota dewan.

"Public Trust ini sangat penting untuk pembangunan daerah. Kepercayaan masyarakat ini merupakan salah satu prasyarat utama menciptakan kepatuhan masyarakat. Artinya, jika public trust kepada Pemerintah Daerah dan DPRD sudah terbangun, maka kepatuhan masyarakat akan terbangun juga dnegan



HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI

"Badan Kehormatan ini juga bertugas meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD. Tentu tugas ini tidak mudah, karena harus mengawasi, bahkan terkadang mengadili rekan sejawat sendiri. Disinilah tantangan yang harus dijawab. Kita harus menunjukkan bahwa BK memiliki kompetensi untuk mengawal pemenuhan etik dan moral para anggota dewan

baik. Misalkan saja, kepatuhan dalam pembayaran PBB, kepatuhan dalam pembayaran

pajak restoran dan lain sebagainya", tutup Anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Kunker ke Papua Barat, Aleg PKS Tegaskan Pemerintah **Harus** **Penuhi Hak Daerah**

KUTIPAN

Manokwari (22/03) -- Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat dalam rangka penelaahan BAKN terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait permasalahan di Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Dalam kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI melakukan pertemuan dengan Kantor BPK Perwakilan, Kantor Pertanahan (Kanwil BPN) dan Pemda Provinsi Papua Barat.

Wakil Ketua BAKN dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, yang turut serta dalam rombongan BAKN, dalam kunjungan kerja ini menyampaikan beberapa pandangannya.

Pertama, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS ini mengatakan bahwa Indonesia menganut system pertanahan dan publikasi negative dimana peran negara sangat minim untuk menjamin kebenaran

data yang disajikan.

"Karena system ini, maka banyak sengketa agraria yang terjadi dan tak kunjung usai. Ini dikarenakan, siapapun dapat diakui oleh negara sebagai pemilik tanah jika dia mampu menunjukkan bukti kepemilikan tanah itu. Dengan adanya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menggunakan system elektronik, sesungguhnya bisa mengarahkan publikasi negative menjadi publikasi positif. Dalam sistem PTSL, negara mengeluarkan sertifikat dengan sistem elektronik," terang Anis.

Anis menyayangkan

system PTSL yang dalam prosesnya, tidak selalu berjalan mulus. Mengutip laporan BPK tentang permasalahan ATR/BPN, masih terdapat berbagai permasalahan dalam proses PTSL diantaranya pelaksanaan pengelolaan data belum memadai, pelaksanaan pengelolaan data yuridis belum memadai, pencatatan dan pelaporan data atas BPHTB dan PPH terutang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, sertifikat yang telah selesai belum diserahkan kepada pemohon, permasalahan pasca sertifikasi asal belum diselesaikan secara memadai.

"Saya sangat memahami, jika permasalahan di daerah-daerah yang memiliki kelangkaan elektronik saja masih berjalan belum baik, apalagi di daerah yang penunjang system elektroniknya masih terbatas seperti Papua Barat," ungkapnya.

Selain itu, Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Negara DPP PKS ini juga menyoroti belum terbentuknya Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Papua Barat yang menjadikan



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

"Pemerintah pusat perlu melakukan perbaikan dalam menampung informasi dan mengelola daerah-daerah yang jauh dari pusat, karena mereka memiliki hak yang sama untuk maju dan berkembang sebagaimana daerah-daerah lainnya"

Papua Barat belum memiliki peta permasalahan pertanahan.

"Menurut Kanwil BPN, mereka hanya menerima laporan kasus sehingga jika tidak ada laporan maka permasalahan pertanahan tidak

ada yang menangani atau mendalami masalahnya. Audit yang dilakukan oleh BPK pun hanya terkait dengan pelaporan keuangan," ungkapnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

TNI-Polri Berguguran di Papua,

Komisi III FPKS: Pemerintah Harus Lindungi Aparat Negara!

KUTIPAN

Jakarta (29/03) — Anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, melakukan interupsi dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 masa persidangan IV Tahun sidang 2021-2022 dengan menyampaikan keprihatinan terkait apa yang terjadi di Papua beberapa waktu terakhir.

Anggota Legislatif dari Fraksi PKS ini menyampaikan bahwa sejak tahun 2019 hingga Januari tahun 2022 sudah ada sekitar 41 prajurit yang tewas akibat aksi terror yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang ada disana.

"Kondisi ini menunjukkan seolah Negara gagal melindungi prajurit TNI yang ada disana belum lagi dengan warga sipil dan pekerja lainnya disana", tegas Nasir.

Dalam kesempatan itu, Nasir Djamil juga berharap pemerintah dapat mengambil

langkah yang cepat dan tepat dalam permasalahan tersebut.

"Pemerintah harus dapat mengambil langkah-langkah strategis dan terukur yang profesional dalam konteks pendekatan keamanan di Papua" harapnya.

Nasir Djamil juga menyampaikan harapannya semoga melalui Pimpinan DPR Ini dapat tersampaikan langsung kepada pemerintah sebagaimana harapannya yang juga mendesak pemerintah untuk dapat serius menanganinya di Papua. Selengkapnya di fraksi.pks.id



H.M. NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Nangroe Aceh Darussalam II

"41 orang ini jangan dianggap remeh, jangan dianggap kecil karena mereka adalah alat Negara. Boleh kita sibuk dengan Ibu Kota Negara tapi jangan lupa melindungi alat Negara, termasuk prajurit Negara yang ada di Papua"

Rendahnya Kecintaan Pada Produk Buatan Indonesia, Aleg PKS ; Pemerintah Jangan 'No Action, Talk Only'

KUTIPAN

Jakarta (29/03) – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Mustafa Kamal, menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada Selasa (29/03).

Dalam kesempatan ini, Mustafa Kamal merespon pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berada di Badung, Bali dalam acara "Aksi Afiriasi Bangsa Buatan Indonesia" pada Jum'at (25/03) lalu. Saat itu, Presiden mengatakan bahwa lembaga negara masih gagal dalam melakukan Afiriasi Aksi Bangsa Buatan Indonesia.

"Kalau saja 40% kecintaan terhadap produk buatan Indonesia ini bisa dibelokkan, akan mendorong pertumbuhan

ekonomi 1,71%. Begitu kata Presiden", ujarnya

Menurutnya, pernyataan Presiden adalah gambaran dari gagalnya negara untuk menumbuhkan kecintaan rakyat terhadap produk dalam negeri.

"Saya kira ini satu ironi, oleh karenanya saya prihatin, di atas prihatin. Pada saat Indonesia sudah merdeka menjelang 77 tahun, tetapi kita belum bisa berdiri di atas kaki sendiri, dengan mencintai dan menggunakan barang sendiri.

Saya kira ini kegagalan kita semua, saya berharap ada

upaya sistematis untuk afirmasi action sampai tahun 2024. Sehingga pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin bisa menyelesaikan tugas-tugasnya pada periode ini dengan baik" ujarnya kepada seluruh anggota legislatif yang hadir.

la menegaskan perlunya affirmative action dari Pemerintah dalam mendorong Aksi Bangsa Buatan Indonesia dan tidak terkena fenomena NATO (No Action, Talk Only).

4"Jangan NATO, ataupun NAJO, No Action, Jengkel Only. Mudah-mudahan, bangsa Indonesia betul-betul menjadi bangsa yang beraksi atas apa yang dikatakan dan kemudian mau berbuat sungguh-sungguh. Sehingga pemerintah dan semua kementerian dapat sukses dan DPR RI mampu mengawal setiap langkah kebijakan dengan sebaik-baiknya", tutupnya.



H. MUSTAFA KAMAL, S.S.
Anggota Komisi X DPR RI

Jangan NATO, ataupun NAJO, No Action, Jengkel Only. Mudah-mudahan, bangsa Indonesia betul-betul menjadi bangsa yang beraksi atas apa yang dikatakan dan kemudian mau berbuat sungguh-sungguh. Sehingga pemerintah dan semua kementerian dapat sukses dan DPR RI mampu mengawal setiap langkah kebijakan dengan sebaik-baiknya



**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri

Tinjau Pengungsi Banjir Bandang Brebes, Fikri Serahkan Sejumlah Bantuan

KUTIPAN

Brebes (21/03) -- Anggota Legislatif DPR RI asal Partai Keadilan Sejahtera, Abdul Fikri Faqih meninjau korban banjir bandang di Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Aleg terpilih dari dapil IX Jawa Tengah ini juga meminta agar Bupati Brebes ikut turun tangan mengatasi bencana banjir ini.

"Bupati diharapkan segera terbitkan pernyataan bencana agar bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dari BNPB dapat turun," pintanya disela penyerahan bantuan kepada para korban di posko pengungsian, Ahad (20/3/2022).

"Korban perlu segera dicarikan lokasi pengganti, baik rumah tinggal maupun tempat usaha yang sebagian merupakan UMKM pembuatan tahu dan tempe," terangnya.

Fikri beserta aleg Provinsi Jateng dan Aleg Dapil 2 Brebes, yakni Sururul Fuad dan Arif Royani Bersama segenap kader PKS Kecamatan Tonjong menyerahkan bantuan kepada seluruh korban banjir bandang

yang sementara harus ditampung di posko pengungsian setempat, sekolah MI Muhammadiyah. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai, alat-alat kebersihan, Perlengkapan kamar mandi, serta perlengkapan bayi seperti selimut dan popok.

Pada kesempatan itu Fikri berdialog dengan Kepala desa Kutamendala, Fathuri, Ketua BPD Kutamendala, Hasan Abdul Kohar, serta Ketua Karang Taruna Kecamatan Tonjong, M. Rosihan Amin. Didampingi Pengurus DPC PKS kecamatan Tonjong, Nino Prayitno dan segenap tim, rombongan meninjau tempat penampungan sementara dan berkesempatan bercengkrama serta mendengarkan aspirasi dari para korban banjir.

Lebih lanjut Fikri menyatakan, pemerintah desa

dan aparat Kabupaten Brebes dapat berkoordinasi dengan Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah untuk Bersama mencari solusi bagi korban banjir di Desa Kutamendala, Tonjong, Kabupaten Brebes.

"Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah agar dapat memberikan solusi bangunan awal bagi para korban," katanya.

Selain itu Fikri menegaskan, jika bupati Brebes menerbitkan surat pernyataan bencana, BPBD Kabupaten Brebes dapat mengajukan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada BNPB.

"Bila dikawal, insyaAllah 12 KK yang kehilangan tempat tinggal dan rumah produksi bisa segera mendapatkan ganti sementara dan bisa segera pindah dari penampungan sementara di sekolah setempat," ujarnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah IX

"Pemerintah desa dan aparat Kabupaten Brebes dapat berkoordinasi dengan Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah untuk Bersama mencari solusi bagi korban banjir di Desa Kutamendala, Tonjong, Kabupaten Brebes. Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah agar dapat memberikan solusi bangunan awal bagi para korban

Nasir Djamil Salurkan 12 Ribu Paket Sembako Selama Pandemi Covid-19

KUTIPAN

Aceh (18/03) --- Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1443 Hijriah, Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil kembali menyalurkan bantuan paket sembako

Pembagian sembako menjadi salah satu program dari rangkaian kunjungan masa reses perorangan ke daerah pemilihan (dapil) Aceh 2.

Realisasi pembagian paket sembako itu telah didistribusikan di delapan kabupaten dan kota meliputi Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Pembagian dilakukan sejak Selasa (15/3/2022) hingga Kamis (17/3/2022).

Bantuan ini adalah paket yang ke 12.000 dari total bantuan paket sembako yang telah disalurkan selama masa pandemi Covid-19.

Paket bantuan itu langsung diantarkan oleh Staf

Nasir Djamil dan dibantu oleh pengurus dan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke rumah-rumah warga yang tersebar di delapan kabupaten dan kota dapil Aceh 2.

Menurut Nasir, pembagian sembako bukan hanya kegiatan menyalurkan bantuan saja, namun sebagai sebuah inisiatif dan kepedulian kepada masyarakat yang kurang mampu juga kelompok masyarakat yang berdampak akibat pandemi Covid-19.

“Bantuan ini kita prioritaskan kepada para janda, disabilitas dan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi rendah. InsyaAllah program sembako akan tetap kita lakukan kedepannya, Saya berharap semoga bisa mengurangi beban masyarakat kita yang sedang mengalami

kesulitan,” kata Nasir Djamil.

Masyarakat penerima bantuan sembako merasa terharu dan bergembira dengan adanya bantuan tersebut harga barang-barang di pasaran. Muncul banyak kekhawatiran masyarakat saat ini, apalagi beberapa barang pokok, seperti minyak goreng menjadi 'langka' dan dijual dengan harga yang tinggi di pasar-pasar tradisional.

“Alhamdulillah, terima kasih Bapak Nasir Djamil sudah ingat kepada kami dan peduli akan situasi yang kami hadapi saat ini, bantuan Bapak sangat bermanfaat” ungkap salah seorang penerima paket sembako yang tidak ingin disebut namanya.

Dalam kegiatan tersebut para Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS di dapil Aceh 2 dan para kader PKS juga ikut aktif dan turun lapangan. Selain membagikan paket sembako secara langsung, kesempatan itu juga digunakan untuk berdialog dan menyerap aspirasi rakyat.

Dikatakan bahwa pembagian sembako ini sangat bermanfaat untuk rakyat ditengah kesulitan ekonomi dan



H.M. NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Nangroe Aceh Darussalam II

“Bantuan ini kita prioritaskan kepada para janda, disabilitas dan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi rendah. InsyaAllah program sembako akan tetap kita lakukan kedepannya, Saya berharap semoga bisa mengurangi beban masyarakat kita yang sedang mengalami kesulitan,”

tingginya angka pengangguran di Aceh.

“Kami pastikan penerima bantuan paket sembako adalah orang-orang yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan

rumah tangga mereka, Alhamdulillah pembagian telah merata sampai ke masyarakat di akar rumput” ungkap salah seorang Ketua DPD PKS.

Bangun Tambak Udang Modern di Sumbawa, Johan Berharap Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

KUTIPAN

Sumbawa (18/03) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan memberikan apresiasi atas terobosan baru dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang akan merealisasikan pembangunan tambak udang terintegrasi di kabupaten Sumbawa NTB, yang direncanakan seluas 528,15 Ha dengan jumlah kolam sebanyak 1.811 kolam.

“Secara khusus saya memberikan apresiasi atas terobosan pembangunan ini, sebab tambak udang modern ini merupakan model pembangunan pengembangan kawasan budidaya udang terintegrasi dengan standar kualitas meliputi instalasi, kualitas air, akuakultur modern 4.0 dan kualitas kawasan pesisir dengan skema budidaya berskala besar dari hulu ke hilir dalam satu Kawasan”, ujar Johan menjelaskan keunggulan program pembangunan ini.

Selanjutnya Johan berharap dengan adanya pembangu-

nan tambak udang modern di Sumbawa ini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjadi andalan bagi kemajuan daerah di Sumbawa NTB.

Hal tersebut diungkapkan Johan saat mendampingi Menteri Trenggono melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan kawasan budidaya udang terintegrasi tersebut yang terletak di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (Jumat, 18 Maret 2022).

Politisi PKS ini juga mendorong agar Kementerian

Kelautan dan Perikanan terus mendampingi dan berkomitmen untuk peningkatan produksi tambak budidaya udang di Sumbawa yang selama ini hanya berkisar 0,6 ton per Ha.

“Saya berharap nantinya hasil panen tambak udang modern ini bisa cukup maksimal di Sumbawa sekitar lebih dari 40 ton per hektar per siklus” ujar Johan.

Wakil Rakyat dari Pulau Sumbawa ini mengingatkan bahwa merujuk pada konsep pembangunan perikanan berkelanjutan perlu kiranya KKP memberi prioritas pada indeks keberlanjutan pada lokasi yang akan dibangun tambak udang modern dengan mengintegrasikan seluruh dimensi baik aspek ekologi, sosial, hukum, ekonomi, kelembagaan, dan teknologi dari wilayah pesisir secara komprehensif sebagai modelling shrimp estate.

“Potensi Sumbawa yang luar biasa ini harus dikelola dengan konsep pembangunan perikanan berkelanjutan agar lingkungan tetap lestari dan rakyat makin sejahtera” urai Johan. Selengkapnya di fraksi.pks.id



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

“Kita berharap rencana terobosan pembangunan tambak udang modern ini benar-benar berdampak signifikan terhadap keunggulan dan daya saing daerah di Sumbawa, oleh karena itu segala hal yang dapat berakibat kurang baik harus segera diantisipasi secara matang dengan ilmu pengetahuan dan strategi jitu”



Upaya Cegah Stunting, Aleg PKS **Dukung** Kampanye Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting

KUTIPAN

Alifudin pun berharap, dengan adanya kegiatan ini, masyarakat tersadar akan pentingnya pencegahan stunting di Indonesia, dengan strategi jitu yang telah disampaikan para ahlinya.

Kapuas Hulu (28/03) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Alifudin mendukung kampanye sosialisasi pada percepatan pencegahan stunting yang bekerja sama dengan mitra kerja Komisi IX yaitu BKKBN.

Hal ini adalah kolaborasi program antara BKKBN dengan Komisi IX DPR RI, karena efektivitas sosialisasi percepatan penurunan stunting terhadap dampak positifnya.

"Kita tentu saja sebagai anggota Komisi IX DPR RI sangat mendukung kegiatan ini sesuai dengan fungsi saya sebagai anggota DPR RI, dan antusias untuk menyampaikan pencegahan stunting" Ucap Alifudin pada

kegiatan, sosialisasi program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja, di Aula DPRD Kapuas Hulu, Minggu (27/03/2022).

Alifudin pun berharap, dengan adanya kegiatan ini, masyarakat tersadar akan pentingnya pencegahan stunting di Indonesia, dengan strategi jitu yang telah disampaikan para ahlinya.

"Walaupun Kapuas Hulu bukan dapil saya, karena saya cinta Kalbar dan dukung penurunan stunting, maka acara mitra ini kita adakan di Kapuas Hulu" tambah Alifudin

Alifudin pun mengingatkan bahwa hidup itu harus direncanakan, berkeluarga pun

kita harus berencana, apalagi tentang percepatan pencegahan stunting.

Selain itu, Bupati Kapuas Hulu, Bapak Fransiskus Diaan, pada sambutannya menyampaikan bahwa, dalam melakukan kerjasama penurunan stunting di Kapuas Hulu ini lumayan baik, pada tahun 2018 angka stunting dari 32,19% berkurang menjadi 28,9% pada tahun 2021.

"Kami juga sudah punya rumus serta strategi terbaik dan mengundang para camat, untuk mempercepat penurunan angka stunting dan pencegahan stunting bisa kita lakukan bersama" Ucap Fransiskus.



H. ALIFUDIN, S.E.,M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I

"Kita tentu saja sebagai anggota Komisi IX DPR RI sangat mendukung kegiatan ini sesuai dengan fungsi saya sebagai anggota DPR RI, dan antusias untuk mengampanyakan pencegahan stunting"



Webinar Dari Pandemi Menuju Endemi

PKS Sumsel **Hadirkan Ahli,** Edukasi Prihal Pandemi

KUTIPAN

Palembang (28/03) -- Jelang Bulan Ramadhan, PKS Sumsel selenggarakan Webinar yang membahas tentang perkembangan terkini Pandemi covid-19 di Sumatera Selatan pada hari Sabtu (26/3/22) melalui pertemuan secara online,

menghadirkan tiga pembicara dari unsur yang berbeda, yakni H. Mustafa Kamal, S.S, anggota DPR RI fraksi PKS, Dr. Iche Andriyani Liberty, S.KM, M.Kes, Tim Ahli epidemiologi, Satgas penanganan covid-19 Sumatera Selatan, dan Dr. Harun Hudari, Sp.PD, KPTI. FINASIM, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropis dan infeksi, dimoderatori oleh tokoh muda Sumsel, Aris Gunawan, M. Kes. Kegiatan ini juga dihadiri ratusan partisipan yang berasal dari dalam dan luar provinsi Sumsel.

Taufik Hidayat, Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial DPW PKS Sumsel dalam sambutannya, menuturkannya PKS Sumsel memberikan perhatian khusus terhadap pandemi, sejak awal mula wabah terjadi dengan membentuk Satgas

diseiap level, penanganan pencegahan dan pengobatan, penghimbau pelaksanaan vaksinasi, termasuk program mendukung masyarakat.

Penyelenggaraan kegiatan webinar ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat, dengan mendengarkan pendapat para ahli sehingga setiap unsur dapat membangun sinergis dalam menghadapi pandemi menuju endemi.

"Melalui dialog dan bertukar pikiran yang intens, baik dari unsur pemerintahan, akademisi, mahasiswa dan para ahli yang kompeten, mudah-mudahan dapat membangun sinergi pada penanganan covid-19" Jelas Taufik.

"Selanjutnya, kita akan memperoleh informasi secara utuh tentang pandemi,

mengkonfirmasi apakah kita memang sudah masuk masa endemi atau belum, yang tak kalah penting juga, masyarakat bisa memfilter informasi 'hoax' yang berkembang". Terangnya.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mustafa Kamal, menyoroti tiga hal dalam penanganan pandemi terkait paradigma, kebijakan publik dan budaya, mengingatkan masyarakat untuk tidak larut dalam euforia yang menyebabkan kelalaian, perlu berdisiplin dengan kebiasaan baru, maupun segi kebijakan pemerintah perlu adanya konsistensi dan menutup celah dari pihak-pihak yang mengambil keuntungan selama pandemi.

Tim ahli epidemiologi Satgas covid 19 Sumatera Selatan, Dr. Iche menyebutkan, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi untuk transisi dari pandemi ke endemi, yakni meliputi laju penularan harus kurang dari 1%, angka kepositifan harus kurang dari 5%, tingkat perawatan rumah sakit harus kurang dari 5%, angka fatality rate atau kematian harus kurang dari 3%.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



H. MUSTAFA KAMAL, S.S.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Selatan I

"Tiga hal dalam penanganan pandemi terkait paradigma, kebijakan publik dan budaya, mengingatkan masyarakat untuk tidak larut dalam euforia yang menyebabkan kelalaian, perlu berdisiplin dengan kebiasaan baru, maupun segi kebijakan pemerintah perlu adanya konsistensi dan menutup celah dari pihak-pihak yang mengambil keuntungan selama pandemi.

Terima Kasih

30K
followers



Sakinah Aljufri: Pelaku Seni dan Ekonomi Kreatif Kota Palu Adalah 'The Best'

KUTIPAN

Palu (30/03) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri, dalam pembukaan kegiatan BISA Fest mengatakan pelaku seni dan ekonomi kreatif Kota Palu adalah orang-orang yang the best.

Karena, lanjut Sakinah, mereka menjadi penggerak seni dan ekonomi yang tangguh dan mampu bangkit setelah diterjang musibah gempa pada tahun 2018 silam.

"Para pelaku seni dan ekonomi kreatif di Kota Palu adalah orang-orang yang the best, orang-orang yang pantang menyerah. Meskipun kita pernah ditimpa musibah pada tahun 2018 yang dahsyat, namun tetap semangat untuk bangkit dan terus kreatif," ucap Sakinah saat sambutan kegiatan BISA Fest di Café 168 House, (27/03) silam.

Politisi perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Sulawesi Tengah ini pun berharap gelaran kegiatan BISA Fest mampu membangkitkan ekonomi para pelaku UMKM,

pelaku seni dan ekonomi kreatif.

"Melalui kegiatan BISA Fest ini diharapkan mampu membangkitkan kembali semangat dan keinginan kuat untuk belajar menembangkan dan menjual produk. Diharapkan mampu membangkitkan kembali ekonomi pelaku UMKM setelah lebih dari dua tahun dihantam pandemi Covid-19" ungkapnya.

Indonesia khususnya Sulawesi Tengah sangat kaya dengan berbagai budaya, seni, kreatifitas dan alamnya dengan berbagai macam keunggulannya.

"Keanekaragaman Sulawesi Tengah bisa menjadi potensi jual ke manca negara. Sebarkan informasi menarik tentang Sulawesi Tengah,

tentang Kota Palu melalui semua kanal media sosial. Informasikan makan khas, tarian, budaya dan ekonominya ke semua penjuror agar Sulawesi khususnya Kota Palu semakin dikenal masyarakat luas," ucap Sekretaris Jendral Wanita Islam Alkhairaat ini.

Sakinah berharap agar para pelaku seni, UMKM dan pelaku ekonomi kreatif harus bangga mengenalkan produknya melalui digital marketing.

"Di Kota Palu terkenal dengan sayur daun kelor, teh daun kelor, jajanan dari daun kelor, utadada dan lain sebagainya. Sekarang sudah zamannya transformasi digital, maka kekasihan ini harus dipasarkan melalui digital marketing. Kalau kita tidak pede untuk mengenalkan produk kita, siapa lagi yang mau mengenalikannya," ungkapnya.

Dalam acara tersebut juga di adakan gelaran kreasi seni, pameran UMKM, dan talkshow krasi seni dan ekonomi kreatif. Kaeigatan BISA Fest kali ini diikuti oleh pelaku UMKM, handicraft, pelaku seni, tari zapin.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Tengah

"Keanekaragaman Sulawesi Tengah bisa menjadi potensi jual ke manca negara. Sebarkan informasi menarik tentang Sulawesi Tengah, tentang Kota Palu melalui semua kanal media sosial. Informasikan makan khas, tarian, budaya dan ekonominya ke semua penjuror agar Sulawesi khususnya Kota Palu semakin dikenal masyarakat luas"





Tarhib Ramadhan di Dapil, Nevi Zuairina **Sampaikan** Pentingnya Ketakwaan dan Keikhlasan

KUTIPAN

Padang (30/03) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina pada kesempatan Tarhib Ramadhan yang diselenggarakan forum Silaturahmi Majelis Taklim Sumbar menyampaikan, tentang peningkatan ketakwaan sebagai bekal dalam kegiatan menjalankan segala aktivitas.

la menekankan, agar ketika memasuki bulan ramadhan, ada persiapan yang sudah dilakukan yakni memastikan Kebersihan dan kesucian hati atau tazkiyatun nafs dan Mempersiapkan diri untuk amalan-amalan istimewa di bulan Ramadhan.

"Ramadhan tahun ini, mesti kita jadikan kesempatan untuk beribadah dengan maksimal dan tidak ada peluang untuk berbuat dosa. Karena dalam Hadits riwayat Bukhari menerangkan Apabila Ramadhan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu", Kutip Nevi menuturkan.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menambahkan, pentingnya keikhlasan di setiap moment baik siang dan malam karena segala aktivitas yang yang positif bernilai ibadah lebih besar dari bulan-bulan biasanya. Keikhlasan menjadi kekuatan bagi orang-orang yang berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari.

"Takwa adalah target ramadhan. Kitab suci kita, menekankan puasa ramadhan ini dengan menyeru kepada orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelumnya agar bertakwa. Hadist Riwayat

Bukhori juga menyebutkan bahwa Barangsiapa melakukan qiyam Ramadhan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni", kutip Nevi Menambahkan.

Politisi PKS ini mengajak pada peserta yang hadir agar Qooma menghidupkan malam-malam dengan shalat dan bertaqarrub / mendekatkan diri kepada Allah. Karena di bulan Ramadhan, adalah momen untuk meningkatkan keimanan dengan memperbanyak ibadah.

"Kita semua, dengan berpuasa ramadhan, semoga senantiasa semakin dekat dengan Allah SWT sehingga keimanan setiap kita juga meningkat. Semoga kita semua ketika berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah (tulus), maka dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu akan diampuni", tutup Nevi Zuairina.



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II

"Kita semua, dengan berpuasa ramadhan, semoga senantiasa semakin dekat dengan Allah SWT sehingga keimanan setiap kita juga meningkat. Semoga kita semua ketika berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah (tulus), maka dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu akan diampuni"



Aleg PKS: Kalo Mau 3 Periode Silahkan Jadi Kepala Desa

KUTIPAN

Bandung (30/03) --- Anggota MPR RI dari Fraksi PKS Teddy Setiadi melakukan sosialisasi MPR RI tentang Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI di Bandung, (27/03/2022).

Dalam kesempatan tersebut Teddy menyampaikan pentingnya Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI khususnya untuk para pemuda di Kota Bandung.

Beberapa pertanyaan mendasar mengenai pancasila, sejarah lahir, dan tokoh tokohnya pun masih banyak yang salah dan tidak bisa dijawab oleh peserta yang hadir.

"Ini menjadi catatan tersendiri supaya kita terus melakukan sosialisasi." Ujar Teddy

Pada kesempatan itu pula Teddy sempat menyinggung bahwa dalam konstitusi kita jabatan presiden itu hanya 2 periode, dan setiap periodenya 5 tahun.

"Kalau mau nambah waktu

jabatan atau 3 periode silahkan jadi Kepala Desa, karena masa Jabatan Kepala Desa itu bisa sampai 3 periode dan setiap periodenya 6 tahun," pungkasnya.

Selain sosialisasi MPR RI, Teddy juga mengajak puluhan pemuda yang hadir untuk bergabung dengan program Agent of Change (AOC) yaitu program kebaikan dan pemberdayaan pemuda berbasis aplikasi.

Meski hadir puluhan pemuda, protokol kesehatan tetap dijalankan dan Teddy berharap covid segera berakhir sehingga bisa lebih massif berkolaborasi dengan para pemuda dalam membangun Bangsa.



TEDDY SETIADI, S.Sos.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat I

"Kalau mau nambah waktu jabatan atau 3 periode silahkan jadi Kepala Desa, karena masa Jabatan Kepala Desa itu bisa sampai 3 periode dan setiap periodenya 6 tahun,"



Beri Sambutan Acara Rakerda, Anis Pesankan Lima Syarat Kemenangan

KUTIPAN

Jakarta (01/04) --- DPD PKS Jakarta Timur telah menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Sabtu-Ahad (26-27/3/2022). Rakerda ini ditujukan untuk merumuskan dan menyepakati berbagai program kerja yang akan dilaksanakan oleh DPD PKS Jakarta Timur pada tahun 2022.

Acara ini dihadiri oleh segenap pengurus DPD PKS Jakarta Timur yang diketuai oleh Ikrar Auliya, para ketua DPC dan DPRa se-Jakarta Timur, anggota DPR RI dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi PKS dari daerah pemilihan Jakarta Timur.

Dalam kesempatan memberikan sambutan, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan apresiasi atas kinerja yang telah diraih oleh pengurus DPD PKS Jakarta Timur.

Anis juga berterima kasih atas kerjasama antara DPD dengan anggota legislative yang telah berjalan dengan baik dan harmonis.

"Saya berharap kerjasama DPD dengan anggota legislative untuk Jakarta Timur yang lebih baik, dapat terus ditingkatkan di masa mendatang," ungkapnya.

Selain itu, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menyampaikan pesan mengenai 5 syarat yang harus dipenuhi struktur PKS untuk meraih kemenangan.

Syarat pertama, sebut Anis, struktur PKS harus memiliki winning value (keunggulan nilai). Anis menjelaskan bahwa program atau kegiatan apapun yang dilakukan oleh PKS, maka hendaknya memiliki nilai-nilai yang kokoh sehingga proses

yang berjalan selalu dijaga dan diwarnai oleh nilai-nilai yang kokoh. Syarat kedua yaitu winning goal (keunggulan tujuan).

"Tujuan PKS dalam beraktivitas dengan masyarakat bukan hanya untuk meraih kemenangan di tahun pemilu 2024, akan tetapi untuk meraih kemenangan yang hakiki dihadapan Allah SWT. Inilah keunggulan tujuan yang dimiliki oleh PKS," ujar Anis.

Selanjutnya, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyampaikan syarat ketiga yaitu winning concept (keunggulan konsep). Jika PKS ingin mendapatkan kemenangan, maka PKS harus memiliki konsep yang unggul dibandingkan dengan partai lain.

"Itu sebabnya, program kerja PKS tidak boleh dituangkan hanya berdasarkan perkiraan. Akan tetapi harus dilandasi oleh kebutuhan riil di masyarakat yang didukung oleh data yang akurat. Dari sinilah akan lahir konsep yang bagus efektif dan efisien. Konsep yang unggul," kata Anis.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

"Tujuan PKS dalam beraktivitas dengan masyarakat bukan hanya untuk meraih kemenangan di tahun pemilu 2024, akan tetapi untuk meraih kemenangan yang hakiki dihadapan Allah SWT. Inilah keunggulan tujuan yang dimiliki oleh PKS,"





Uluputty Bagikan Sembako untuk 1000 Nelayan di Aru

KUTIPAN

Ambon (18/03) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, melakukan kunjungan kerja perdananya sebagai dewan pusat di Kabupaten Kepulauan Aru, Kamis, (17/03/2022).

Di kesempatan itu, Uluputty membagi sembako untuk 1000 masyarakat nelayan di gedung SD 6 Kabupaten Kepulauan Aru.

Bagi-bagi sembako, yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Bakti Nelayan itu, melibatkan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual, yang merupakan perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

Eks Ketua Komisi D DPRD Maluku itu mengaku antusias saat kegiatan bakti direncanakan dilakukan di Aru. Ia berharap, pelaksanaan bakti ini dapat bermanfaat bagi masyarakat nelayan sekitar. Selain sebagai bentuk nyata kepedulian, bakti ini bisa dimaknai sebagai ajang silaturahmi dengan masyarakat.

Sangat antusias ketika berencana untuk menggagas kegiatan bakti bersama nelayan

di Maluku," harap Uluputty.

Ia menjelaskan, berdasarkan pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) RI yang diatur dalam Permen-KP No.1 Tahun 2009, perairan laut Aru masuk dalam pembagian WPP RI nomor 718 bersama laut Arafuru.

WPP-RI, lanjutnya, merupakan daerah penangkapan ikan, konservasi, pembudidayaan ikan, penelitian serta pengembangan perikanan pedalaman, laut territorial, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan zona tambahan.

"WPP ada di Maluku yaitu WPP 714, 715 dan 718, dan WPP 718 ada di Aru. Untuk itu, ikan-ikan di Aru adalah anugerah Tuhan kepada masyarakat Aru, Maluku dan Indonesia. Potensi yang diberikan ini bisa berdampak kepada kesejahteraan dan

makmurnya nelayan di Aru. Dalam konteks itulah, saya merasa penting untuk datang langsung ke Aru," jelas Uluputty.

Di sisi lain, pergeseran peran dan fungsi lembaga legislatif di era otonomi daerah ditandai dengan penegasan akan peran tugas dan wewenang dewan, yakni selain menyerap dan menyalur aspirasi masyarakat menjadi sebuah kebijakan pemerintah daerah juga melakukan fungsi pengawasan. Selain itu, dinyatakan dalam UU No. 32 Tahun 2004, bahwa DPRD harus menyatu dengan masyarakat daerah dan dipisahkan dari pemerintah daerah.

"Atas dasar di atas, kalau untuk bikin kegiatan yang lain, mungkin saya bisa bikin di tempat lain. Tetapi saya ingin mendengar aspirasi masyarakat karena anggota dewan itu adalah jembatan bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, anggota dewan yang hanya duduk-duduk saja, tidak akan berbicara mewakili masyarakat," tutur Uluputty. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

"Kebijakan program dari KKP bukan hanya dari sektor tangkap saja, tetapi sektor budi daya dan lain-lain. Itu yang harus kita sampaikan informasinya ini kepada Dirjen-dirjen, agar program yang masuk kesini dirasakan benar oleh masyarakat nelayan. Olehnya itu, saya minta dukungan dan kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat"

Bersama PW Alpind, Nevi Berikan Trauma Healing bagi Anak-Anak Korban Gempa Pasaman

KUTIPAN

Pasaman (01/04) --- Anggota DPR RI asal Sumatera Barat II dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, bersama Pengurus Wilayah Aliansi Perempuan Indonesia (Alpind) Sumatera Barat memberikan Trauma healing korban gempa di Kampung Tabek Malampa, Pasaman.

Turut berpartisipasi, Pengurus Daerah Alpind Kabupaten Pasaman, Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Tanah Datar dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman.

Politisi PKS ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada para korban bencana gempa pasaman dan pasaman barat karena meskipun gempa telah tiada, tapi dampaknya masih tersisa hingga saat ini. Dampak secara fisik dan psikologis masih terasa sehingga pembangunan fisik dan mental mesti terus dilakukan.

"Gempa di Kabupaten

Pasaman dan Pasaman Barat ini masih banyak menyisakan dampak yang mesti diselesaikan. Anak-anak korban gempa masih perlu dukungan penguatan secara psikologis. Mudah-mudahan, upaya trauma healing yang sedang berlangsung ini mampu mengurangi beban psikologis terutama pada anak-anak sehingga nantinya kembali bangkit semangatnya untuk belajar dan meneruskan cita-citanya", tutur Nevi.

Legislator PKS ini menerangkan, bahwa korban bencana harus tetap menjalankan terus kehidupan. Ia mengatakan, pengawalan

bantuan hingga sampai ke rumah-rumah terus berjalan.

Nevi mengatakan, bahwa ia terjun langsung dalam mengawal bantuan hingga sampai ke rumah warga terdampak gempa. Bantuan paket kebutuhan rumah tangga dan anak-anak menjadi prioritas agar pangan, pendidikan dan kesehatan tetap terjamin untuk melanjutkan kehidupan.

"Anak-anak masih takut untuk sekolah. Trauma healing menjadi sangat penting untuk anak-anak agar menjadi berani, percaya diri, dan mulai melupakan segala hal buruk kejadian bencana. Tidak bisa instan, program ini mesti berkelanjutan karena korban bencana tidak seragam sehingga ada yang cepat pulih dan ada yang lambat pulihnya", tutur Nevi Zuairina.



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II

"Anak-anak masih takut untuk sekolah. Trauma healing menjadi sangat penting untuk anak-anak agar menjadi berani, percaya diri, dan mulai melupakan segala hal buruk kejadian bencana



Andi Akmal Serahkan Bantuan Ribuan Sak Semen untuk Rumah Ibadah dan Pesantren di Bone

KUTIPAN

Kabupaten Bone (21/03) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin pada kesempatan kunjungan daerah Pemilihan, menyerahkan Bantuan 1000 sak semen tonasa untuk berbagai rumah ibadah dan Pesantren.

Bantuan ini disebarakan baik secara langsung maupun perwakilan team yang tergabung dalam Relawan AAP (Andi Akmal Pasluddin).

“Alhamdulillah bantuan semen Tonasa ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan rumah-rumah ibadah maupun pesantren di Bone ini, agar segera dapat dimanfaatkan. Sebentar lagi masuk bulan puasa, dimana sudah menjadi kebiasaan masyarakat semakin mendekati diri kepada sang pencipta, dengan memanfaatkan rumah ibadah seperti masjid ataupun mushola untuk berbagai aktivitas kegiatan. Semakin

cepat selesai pembangunan rumah-rumah ibadah yang dinantikan masyarakat sekitar, semakin tenang masyarakat dalam menyambut bulan puasa maupun idul fitri”, tutur Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengucapakan banyak terima kasih pada pihak semen tonasa yang memberikan bantuan sebagai tanggung jawab sosial dari segala aktivitas usahanya. Dengan disalurkan bantuan yang rutin dari pihak semen tonasa, diharapkan hubungan antara perusahaan dan masyarakat semakin harmonis saling membantu dan saling mendukung.

Akmal menjelaskan,

bahwa 1000 sak semen tonasa yang ia salurkan, tidak pada satu titik saja. Karena banyak sekali aspirasi masyarakat untuk dibantu pembangunan baik untuk rumah ibadah maupun pesantren. Ia berharap, beberapa lokasi yang memang dekat dengan aktivitas usaha pabrik dapat juga bantuan-bantuan terutama sarana air bersih, perbaikan kondisi lingkungan dan hal-hal positif lain yang membuat nyaman masyarakat.

“Semoga dukungan semen tonasa di Sulawesi Selatan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik fisik maupun spiritualnya. Dengan peningkatan kualitas lingkungan dan SDM, kedepannya, kualitas keekonomian masyarakat pun juga dapat meningkat termasuk kualitas keagamaan maupun pendidikannya”, tutup Andi Akmal Pasluddin.



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II

“Semoga dukungan semen tonasa di Sulawesi Selatan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik fisik maupun spiritualnya. Dengan peningkatan kualitas lingkungan dan SDM, kedepannya, kualitas keekonomian masyarakat pun juga dapat meningkat termasuk kualitas keagamaan maupun pendidikannya”



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Salurkan
ASPIRASI ANDA
DI HARI ASPIRASI
FRAKSI PKS DPR RI

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan
setiap Selasa dan Jum'at.

Ajuan Aspirasi

Isi via website form : <https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>



Terima Aspirasi terkait Banjir
Bertahun-tahun

Aleg PKS: Kami Akan Kawal dan Advokasikan!

KUTIPAN

Jakarta (30/03) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, menerima kunjungan aspirasi secara daring via zoom dari Pemerintah Desa Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, Rabu pagi, (30/03).

Dalam agenda tersebut, Anggota Legislatif dari komisi V ini mendengar keluhan warga dan aparat desa terkait banjir yang rutin terjadi sepanjang tahun di Desa Bojong Kulur akibat luapan sungai Cikeas dan Cileungsi. "Permasalahan terkait banjir ini nantinya akan kami sampaikan pada Rapat Dengar Pendapat selanjutnya di komisi V, khususnya kepada Kementerian terkait, yakni PUPR", ujar Suryadi.

Sebagai bentuk tindak lanjut, anggota legislatif yang kerap disapa SJP ini meminta laporan dan data pendukung kepada para aparat desa untuk menjadi bahan baginya ketika menyampaikan aspirasi kepada Kementerian PUPR dan Dirjen

lain di bawah KemenPUPR.

"Untuk teknis, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Mohon data-data pendukung dilampirkan agar segera dapat kami sampaikan ke stakeholder", pinta Anggota DPR dari Dapil Lombok tersebut.

Dalam kesempatan itu pula, Suryadi menyampaikan bahwa masalah ini nantinya akan diusahakan dan dikawal, sehingga menjadi prioritas Pemerintah dalam penanganannya baik secara teknis maupun anggaran. "Kami akan berupaya terkait anggaran yang dibutuhkan, khususnya Kajian LARAP yang diaspirasikan oleh warga agar bisa dianggarkan tahun ini. Kami akan coba kawal isu ini," tutupnya.



H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI

"Masalah ini nantinya akan diusahakan dan dikawal, sehingga menjadi prioritas Pemerintah dalam penanganannya baik secara teknis maupun anggaran. Kami akan upayakan terkait anggaran yang dibutuhkan, khususnya Kajian LARAP yang diaspirasikan oleh warga agar bisa dianggarkan tahun ini. Kami akan coba kawal isu ini

Hadiri Women Leadership Forum Virtual, Nevi Bicara Optimalisasi Relasi dan Jejaring Organisasi

KUTIPAN

Jakarta (21/03) — Anggota DPR RI FPKS, Nevi Zuairina pada kegiatan rutin Women Leadership Forum pada bulan ini menyampaikan optimalisasi relasi, kemitraan dan jejaring organisasi untuk istri pejabat publik yang berasal dari PKS.

Nevi mengatakan, Jejaring organisasi baik secara kualitas maupun kuantitas, sangat dipengaruhi oleh pimpinan dari organisasi. Sehingga kapasitas orang-orang yang menjalankan organisasi itulah yang dapat mengoptimalkan relasi, kemitraan, dan jejaring.

“Banyak kita menemukan pemimpin sukses di berbagai bidang pada saat ini. Mereka datang dari berbagai latar belakang dan pendidikan. Ada salah satu hal yang perlu kita lihat, yaitu mereka pada umumnya cepat melihat peluang dan tahu siapa yang perlu diajak bekerja sama. Kemampuan tersebut timbul karena mereka mempunyai

jejaring strategis yang kuat”, tutur Nevi dalam sambutannya.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menekankan akan pentingnya peranan tokoh publik dalam mempersiapkan kesuksesan dengan persiapan yang direncanakan sejak awal. Pihak lain dapat memberikan dukungan, masukan, insight, informasi dan berbagai sumber daya.

Nevi mengingatkan, akan fenomena kesuksesan di awal, tapi di tengah atau di ujung mengalami kesulitan untuk membangun dan mengoptimalkan jejaring. Hal ini dikarenakan adanya terlena pada keyakinan akan kemampuan teknis belaka.

“Pada posisi pimpinan unit

atau lembaga, kita harus mulai memperhatikan masalah strategis yang lebih luas. Mengukur bagaimana lembaga yang kita pimpin bisa memberikan kontribusi dan maslahat dalam konteks yang lebih besar mesti menjadi perhatian. Oleh sebab itu kita dituntut untuk dapat menentukan arah kedepan serta kemampuan melibatkan pihak-pihak lain yang dibutuhkan”, urai Nevi.

Politisi PKS ini memberikan panduan untuk membangun jejaring yang di antaranya setiap pejabat publik mesti menyediakan alokasi waktu untuk Membangun Jejaring, bertemu dengan banyak orang, membangun integritas sehingga reputasi baik, terbuka terhadap semua elemen sehingga orang mudah berkomunikasi, dan mengetahui langkah-langkah di masa yang akan datang sehingga memiliki visi misi yang jelas.

“Membangun Jejaring Adalah Keterampilan yang Perlu Dilatih. Sehingga lebih ditentukan oleh kemauan daripada bakat. Membangun dan mengoptimalkan jejaring



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II

“Membangun Jejaring Adalah Keterampilan yang Perlu Dilatih. Sehingga lebih ditentukan oleh kemauan daripada bakat. Membangun dan mengoptimalkan jejaring adalah keterampilan yang perlu dilatih. Alokasi ulang waktu kita, sediakan waktu untuk membangun jejaring”,

adalah keterampilan yang perlu dilatih. Alokasi ulang waktu kita, sediakan waktu untuk membangun jejaring”, tutur

Nevi Zuairina dalam sambutan acara Women Leadership Forum itu.



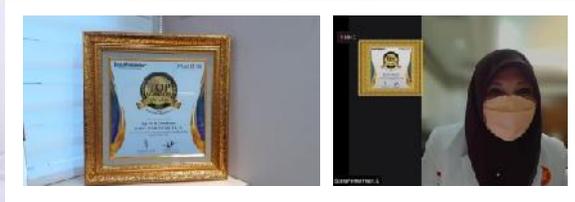
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kreatif Atraktif Substantif



Selamat & Sukses
**Ibu Hj.
Nevi
Zuairina**

Atas Anugerah
**Top Legislator
Award 2022**





Jadi Top Legislator Award 2022

Nevi Zuairina: **Semua** Saya Peruntukan bagi Wartawan dan Netizen

KUTIPAN

Top Legislator Award 2022 merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berhasil membangun personal branding berdasarkan Digital Awareness Aspect, Digital Media Aspect, dan Social Media Aspect.

Jakarta (29/03) — Anggota DPR RI asal Sumatera Barat dari Parpol PKS, Nevi Zuairina dianugerahi Top Legislator Award 2022.

Top Legislator Award 2022 merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berhasil membangun personal branding berdasarkan Digital Awareness Aspect, Digital Media Aspect, dan Social Media Aspect.

"Alhamdulillah, anugerah ini saya peruntukan untuk sahabat wartawan dan netizen ibu di media sosial," ujar Nevi dikonfirmasi soal anugerah

tersebut ke media di Padang.

Digital Awareness Aspect dari penelusuran mesin pencarian adalah parameter mengukur banyaknya pengguna internet yang mencari Anggota DPR RI dalam rata-rata bulanan, serta banyaknya ulasan terkait Anggota DPR RI di halaman internet dalam kurun waktu 1 tahun dengan keyword tertentu.

Sedangkan Digital Media Aspect dengan bobot 30 persen, Parameter ini menggunakan pengukuran banyaknya pemberitaan di media digital terhadap suatu Anggota DPR RI yang tercapture melalui berbagai media digital.

Parameter ini juga menentukan berapa banyak dominasi sentimen positif dan negatif terhadap suatu pemberitaan Anggota DPR RI yang mengacu kepada 5 halaman pertama mesin pencari (50 pemberitaan) dengan Tools News.

Ketiga, Social Media Aspect bobot 30 persen, parameter ini menggunakan 3 media sosial; Facebook, Instagram dan Twitter, untuk mengetahui popularitas serta berapa banyak pengguna sosial media yang menjadi pengikut atau mengikuti Anggota DPR RI melalui ketiga sosial media tersebut.

Dari pandangan banyak pihak anugerah itu adalah fakta dari hasil kolaborasi dan sinergisitasnya politisi nasional PKS dengan pers dan eksisnya Nevi Zuairina di banyak platform media.

**Hj. NEVI ZUAIRINA**Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II

"Alhamdulillah, anugerah ini saya peruntukan untuk sahabat wartawan dan netizen ibu di media sosial,"

Bahas Keuangan Otonomi Daerah, Aleg PKS: **Kita Kawal RAPBN 2023 yang Pro pada Daerah**

KUTIPAN

Jakarta (26/03) - Konsolidasi Nasional Pimpinan Fraksi PKS se-Indonesia turut menyelenggarakan diskusi bertemakan Prospek Otonomi Daerah Pasca UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

yang difasilitasi oleh Anggota Komisi XI Ecky Awal Muharram serta Deputi Kepala NPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan

Keuangan Narasumber Raden Suhartono Deputi Kepala BPKP Daerah dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi, pada Kamis siang (24/03).

Mengawali acara, Ecky Awal menyampaikan pandangan mengenai dana alokasi umum yang dihapus oleh Pemerintah.

"Kita Fraksi PKS berjuang untuk tidak menurunkan 26 persen dana alokasi umum untuk daerah, bahkan kita berusaha agar dinaikkan menjadi 33 persen. Akan tetapi,

KONSOLIDASI NASIONAL & BIMTEKNAS
PIMPINAN FRAKSI PKS SE INDONESIA

ternyata tidak dinaikkan dan bahkan sekarang tidak ada batas seperti 26 persen seperti yang dulu. Ini menjadi kekhawatiran kita bersama", ucap Ecky.

Selanjutnya, mewakili BPKP, Raden menyampaikan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh daerah dalam mewujudkan pendapatan daerah yang besar harus selaras dengan pihak yang lebih tinggi.

"Pengawasan yang dilakukan oleh BPKP juga termasuk berkenaan dengan

perencanaan daerah. Perencanaan harus mendasarkan pada perencanaan yang lebih tinggi. Dalam artian perencanaan kabupaten/kota dalam RKPD harus memperhatikan RKPD Provinsi. RKPD Provinsi harus memperhatikan Pusat. Harus ada sinkronisasi antara jangka menengah pendek dan antar daerah", Tutur Raden.

Sebagai penutup, Ecky Awal menyampaikan Pemerintah belum siap dalam hal penganggaran untuk daerah. Ia menyampaikan bahwa akan mengawal RAPBN 2023. Kita akan kawal kebijakan pokok-pokok fiskal di bulan juni. Agar akan pro kepada daerah.

"Pemerintah belum siap. Dan tentunya akan kita kawal dalam RAPBN 2023. Di bulan juni nanti akan kita kawal kebijakan pokok-pokok fiskal agar pro kepada daerah", Pungkas Ecky.



H. ECKY AWAL MUCHARAM
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Ekonomi dan Keuangan

"Kita Fraksi PKS berjuang untuk tidak menurunkan 26 persen dana alokasi umum untuk daerah, bahkan kita berusaha agar dinaikkan menjadi 33 persen. Akan tetapi, ternyata tidak dinaikkan dan bahkan sekarang tidak ada batas seperti 26 persen seperti yang dulu. Ini menjadi kekhawatiran kita bersama",



Diakhir Agenda Konsolidasi Nasional 2024, Sukamta Ajak Aleg PKS Terdepan Perjuangan Rakyat

KUTIPAN

Jakarta (25/03) — Ketua Panitia Konsolidasi Nasional dan Bimteknas Fraksi PKS se-Indonesia, Sukamta mengatakan Fraksi PKS harus menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan selalu hadir dalam setiap permasalahan yang menyangkut hajat hidup rakyat.

"Karena itu dalam kesempatan ini, Fraksi PKS DPR RI mengajukan hak Angket atas Kelangkaan dan Kemahalan Harga Minyak Goreng," tegas Wakil Ketua Fraksi Bidang Politik Hukum dan Keamanan ini.

Sukamta menambahkan, Anggota Legislatif PKS baik di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota harus menjadi lokomotif kemenangan PKS di Pemilu 2024 di daerah pemilihan masing-masing.

"Karena itu semua anggota legislatif baik dari tingkat pusat, propinsi dan kabupa-

KONSOLIDASI NASIONAL & BIMTEKNAS
PIMPINAN FRAKSI PKS SE-INDONESIA

ten/kota harus mampu bersinergi, bergerak bersama-sama memenangkan partai," tandas Anggota Komisi I DPR RI ini.

Menurut Sukamta, Seluruh anggota legislatif Fraksi PKS harus berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa dan negara.

"Dengan ini Anggota legislatif PKS diberbagai

tingkatan harus membangun komunikasi seluas-luasnya dengan publik dan tokoh serta berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa dan negara untuk mewujudkan sila ketiga Pancasila; Persatuan Indonesia," ujarnya.

Fraksi PKS, imbuhnya, harus terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta memajukan budaya bangsa sebagai sarana untuk mengokohkan persatuan, menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kebaikan yang universal.

"Fraksi PKS akan bekerja keras menjaga demokrasi dan memastikan bahwa agenda demokrasi berjalan dalam koridor konstitusi UUD Negara RI tahun 1945. Karena itu Fraksi PKS dengan tegas menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden, karena mengkhianati konstitusi dan agenda reformasi serta merampas hak-hak rakyat," tutup Anggota DPR RI Dapil Yogyakarta ini.



H. SUKAMTA, Ph.D.
Ketua Panitia

"Anggota legislatif PKS diberbagai tingkatan harus membangun komunikasi seluas-luasnya dengan publik dan tokoh serta berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa dan negara untuk mewujudkan sila ketiga Pancasila; Persatuan Indonesia"

Singgung Penundaan Pemilu 2024, WaKa MS: Tanda-Tanda Kematian Demokrasi, **PKS Menolak!**

KUTIPAN

Jakarta (25/03) -- Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Muhammad Shohibul Iman, menyampaikan pandangannya terkait dengan isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan, dalam kesempatannya memeberikan arahan dalam Acara Konsolidasi nasional dan Bimteknas Fraksi PKS se-Indonesia (25/03).

Baru-baru ini menguak isu penundaan pemilu 2024 di hadapan publik. Shohibul Iman menilai bahwa isu ini merupakan bagian dari permainan psikologis yang dilakukan oleh rezim pemerintahan saat ini. Karena, ibunya, bukan hanya pihak-pihak yang menduduki istana merdeka saja yang memiliki kepentingan di dalamnya, akan tetapi anggota legislatif dan pimpinan daerah pun ikut memiliki kepentingan yang sejalan.

"Isu ini sesungguhnya juga menarik dan menguntungkan

KONSOLIDASI NASIONAL & BIMTEKNAS
PIMPINAN FRAKSI PKS SE-INDONESIA

bagi kita semua selaku anggota legislatif dan pimpinan daerah. jika benar terlaksana penundaan pemilu, maka kita tidak perlu berjuang lagi untuk mempertahankan jabatan kita saat ini. Bukankah ini permainan yang cerdas?" paparnya.

Walaupun demikian, ibunya, politisi dari fraksi PKS menyatakan dengan tegas

bahwa kami menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Karena isu ini menyangkut kehidupan demokrasi bangsa.

"Karena kita berpikir dengan lebih substantif. Isu ini menyangkut kehidupan demokrasi yang diperjuangkan dengan berdarah-darah oleh masyarakat dan anak muda. Tanpa isu ini, kita masih dalam kondisi transisi demokrasi belum mencapai tahap konsolidasi demokrasi. Isu ini akan semakin memporakporandakan demokrasi kita" tegasnya.

Lebih lanjut, Mantan Presiden PKS ini juga mengutarakan kekhawatirannya bahwa isu ini berpotensi untuk mengembalikan sistem pemerintahan otoriter yang ditinggalkan sejak lama.

"Setelah mengupayakan perpanjangan jabatan 3 tahun, bukan tidak mungkin ikhtiar lebih lanjut dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan 5 tahun lagi, bahkan seumur hidup. Maka, jika hal itu terjadi besar kemungkinan kita akan



H. MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS

"Ketika oposisi dihukumi anak haram dan menghancurkan NKRI, inilah bentuk legitimasi terhadap oposisi. Padahal secara hukum, jelas bahwa oposisi memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi check and balances. Namun, saat ini, tindakan penolakan yang dilakukan oposisi dianggap merongrong kewibawaan negara"

kembali menjadi negara otoriter. Untuk menghindari hal ini, maka perlu menghindari kematian demokrasi", jelasnya.

Lebih lanjut, Shohibul Iman memaparkan terkait dengan ciri-ciri kematian demokrasi. Menurutnya, kematian demokrasi bukan

hanya dapat terjadi karena kepemimpinan militer akan tetapi juga oleh kepemimpinan sipil, jika pemerintah yang terpilih kemudian menunjukkan watak-watak otoriter.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Jadi Pemateri Komunikasi Publik, Alfito Deannova Ajak Kader PKS Lebih Proaktif Bahas Isu Politik

KUTIPAN

Jakarta (25/03) --- Hari terakhir pelaksanaan acara Konsolidasi Nasional dan Bimtek-nas Pimpinan Fraksi PKS Se-Indonesia tahun 2022 turut menghadirkan Alfito Deannova Gintings Editor in Chief Detik.com untuk menyampaikan materi terkait 'Strategi Komunikasi Publik untuk Anggota Legislatif', di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Jumat pagi (25/03).

Dalam materinya, Alfito membeberkan bahwa berita yang diminati masyarakat saat ini adalah berita yang menginspirasi.

"Media banyak berfokus untuk mencari tokoh-tokoh yang inspiratif, utamanya dari kalangan politisi", ungkap mantan wartawan TVOne tersebut.

Oleh sebab itu, ia berpesan kepada seluruh anggota legislatif (aleg) PKS agar lebih proaktif dalam menjalin hubungan dengan jurnalis, sekaligus tidak menolak apabila ada wartawan yang datang untuk mewawancarai terkait isu

KONSOLIDASI NASIONAL & BIMTEKNAS
PIMPINAN FRAKSI PKS SE-INDONESIA

tertentu akibat memiliki persepsi atau pandangan negatif terhadap media. Menurutnya, publikasi berita yang buruk itu ketika Aleg PKS tidak berbicara apa-apa sama sekali.

"Jangan sekali-sekali mengatakan tidak pada wartawan yang datang. Sebab, dengan mewawancarai bukan semata-mata untuk populer, bukan

semata-mata bisa terpilih lagi, tetapi ini penting untuk membangkitkan semangat dan kesadaran publik", ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa sesungguhnya posisi PKS sangat potensial. Ada banyak hal yang bisa di-address atau disampaikan oleh PKS, sebagai satu-satunya oposisi dan itu menjadi nilai tambah.

"PKS perlu lihai dalam 'Riding the waves'. Hal ini adalah cara yang paling mudah dan paling sepele dalam dunia jurnalisme, yaitu dengan masuk ke arus isu yang sedang hangat di publik. Ini yang seharusnya menjadi fokus dari aleg-aleg PKS", tambahnya.

Namun, Alfito menyayangkan banyak sekali masalah yang harus di address oleh PKS, tetapi tidak dimaksimalkan. Belum maksimalnya isu-isu yang bisa digagas oleh PKS. Oleh sebab itu, harus ada letupan ide baru yang membuat Aleg disorot publik.

"Harus ada langkah yang serius ketimbang tampilan-tampilan yang sifatnya di permukaan dan sifatnya



ALFITO DEANNOVA GINTINGS

Editor in Chief Detik.com

"Jangan sekali-sekali mengatakan tidak pada wartawan yang datang. Sebab, dengan mewawancarai bukan semata-mata untuk populer, bukan semata-mata bisa terpilih lagi, tetapi ini penting untuk membangkitkan semangat dan kesadaran publik",

konvensional semata", ujarnya di hadapan seluruh peserta Konsolnas.

Tidak lupa, di ujung penyampaian, Alfito berpesan kepada seluruh peserta bahwa

di era digital ini para Aleg PKS harus mampu menyeimbangkan bagaimana bermain dan berperan di media sosial serta di media konvensional.

Siap Menang pada Tahun 2024, PKS Tekankan Integrasi Dari Hulu Ke Hilir

KUTIPAN

Jakarta (25/03) --- Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, memberikan arahan terkait arah gerak politik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan meraih kesuksesan di Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada acara Konsolidasi Nasional dan Bimteknas Fraksi PKS se-Indonesia, Kamis malam (24/03/2022).

"Pertama Integritas, banyak yang mencari-cari kesalahan kita maka kita harus berhati-hati, tidak ada zero case, sangat mungkin yang tidak salah menjadi salah iluh rekayasa. Kemudian profesional, saya berharap kepala daerah itu memberikan profesionalitas yang bisa dicontoh warga di daerahnya, kita lakukan transformasi" papar Jazuli.

Jazuli menyoroti terkait perubahan profesionalitas dari mulai cara berpakaian yang menggambarkan marwah dan dibawa, nantinya akan menunjukkan integritas. Anggota legislatif mulai dari

**KONSOLIDASI
NASIONAL &
BIMTEKNAS**
PIMPINAN FRAKSI PKS SE INDONESIA

pusat hingga daerah harus bisa mengkondisikan dan mencocokkan situasi bahwa komunikasi yang dijalin untuk membangun profesionalitas bisa dimulai dari menghidupkan suasana profesional itu sendiri.

"Kita banyak berbuat untuk masyarakat tapi malu mengklaim, sampaikan semua perbuatan kita kepada media tidak perlu malu-malu, sehingga advokas berjalan dengan baik. Kita harus memahami apa persoalan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita harus menyentuh kesulitan-kesulitan rakyat dengan sentuhan hati sehingga perbuatan kita itu

akan menjadi lebih berarti di hati rakyat" tambah Jazuli

Jazuli menambahkan poin yang tak kalah penting yaitu vitalnya peran publikasi dan advokasi yang masif dari seluruh anggota di daerah. Transformasi digital harus diperkuat dan dilakukan secara up to date di pusat maupun daerah, sudah menjadi kewajiban setiap daerah memiliki humas dan tim yang bertugas untuk publikasi, ini merupakan catatan yang perlu diperhatikan.

"Yakinkan bahwa kita punya komitmen kebangsaan NKRI. Sejak tahun lalu di pusat sudah ada mimbar demokrasi kebangsaan setiap sebulan sekali, dan ini harus dilakukan juga di daerah guna meraih segmentasi yang seluas-luasnya. Maka kita harus terus membuat acara dengan tema-tema kebangsaan" Ujar Jazuli

Saat ini, karakter NKRI seringkali dipisahkan dari PKS, padahal PKS sangat menjaga NKRI tetap utuh dengan menjalankan gaya berpolitik yang terbuka.

Terakhir, Jazuli meminta seluruh anggota legislatif melakukan politik yang atraktif



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Yakinkan bahwa kita punya komitmen kebangsaan NKRI. Sejak tahun lalu di pusat sudah ada mimbar demokrasi kebangsaan setiap sebulan sekali, dan ini harus dilakukan juga di daerah guna meraih segmentasi yang seluas-luasnya. Maka kita harus terus membuat acara dengan tema-tema kebangsaan"

dan kreatif, cepat tanggap untuk upgrade atraksi apa saja yang bisa disuguhkan untuk masyarakat.

"Terus atraksikan, karena kita masih kecil (perolehan

suaranya), maka terus beratraksi dari pusat sampai daerah agar masyarakat melihat kinerja kita yang sesungguhnya", tutupnya.



Sekjen PKS **Sampaikan** Pentingnya Kolaborasi dan Transformasi Kader

KUTIPAN

Jakarta (25/03) — Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera, Habib Aboe Bakar Alhabsyi memberikan materi kepada seluruh anggota legislatif (Aleg) DPRD Provinsi dan Kabupaten-Kota seluruh Indonesia terkait 'Kolaborasi Aleg Pusat-Provinsi-Kota/Kabupaten dalam Pemenangan Pemilu Berbasis Dapil' saat acara Konsolidasi Nasional dan Bimteknas Fraksi PKS Se-Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Kamis sore (24/03).

Dalam penyampaianya, Habib Aboe menegaskan pentingnya peran fraksi di parlemen sebagai representasi dari sebuah partai politik. Ia menekankan bahwa fraksi merupakan kepanjangan dari partai politik. Sehingga, berbagai instruksi, arahan, dan keputusan partai harus diikuti secara tegak lurus oleh fraksi yang ada di parlemen, tidak boleh terjadi perbedaan antara pandangan fraksi dengan partai.

"Fraksi adalah etalase partai. Wajah depan partai

**KONSOLIDASI
NASIONAL &
BIMTEKNAS**
PIMPINAN FRAKSI PKS SE INDONESIA

adalah fraksi. Ini harus menjadi perhatian benar sesuai dengan struktur masing-masing", tegas Habib Aboe.

Lebih lanjut, ia mengingatkan para Aleg untuk rutin berkoordinasi dengan pengurus di struktur internal partai. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh Aleg harus berkoordinasi

dengan struktur di partai politik. "Hargai struktur dan hargai kader kita di daerah masing-masing. Aleg harus sering berkomunikasi dengan mereka." pesannya.

Tak hanya itu, menurut Habib Aboe, Aleg PKS harus lincah dalam bersosialisasi dengan para pejabat dan tokoh-tokoh penting di wilayah mereka.

"Aleg PKS harus mampu berinteraksi dengan seluruh pejabat-pejabat Lembaga negara. Jangan minder, jangan diam, jangan merasa rendah di hadapan mereka. Anggota legislatif PKS harus kenal dengan perangkat serta pejabat di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jalin komunikasi untuk melakukan kolaborasi", tegasnya lagi.

Lebih lanjut, meminta kepada para Aleg di daerah untuk selalu bersuara ketika DPR pusat telah bersikap terhadap suatu isu. Oleh sebab itu, ia menyerukan agar fraksi PKS di DPRD harus rajin dalam mengundang wartawan membuat konferensi pers atau semacamnya.

"Dengan memberikan sikap PKS kepada khalayak



HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI
Sekjen DPP PKS

"Aleg PKS harus mampu berinteraksi dengan seluruh pejabat-pejabat Lembaga negara. Jangan minder, jangan diam, jangan merasa rendah di hadapan mereka. Anggota legislatif PKS harus kenal dengan perangkat serta pejabat di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jalin komunikasi untuk melakukan kolaborasi",

luas, ini menunjukkan bahwa PKS peduli dengan kesulitan-kesulitan masyarakat di bawah. Kita wajib optimalkan dan maksimalkan fungsi kita, yakni fungsi legislasi, fungsi

anggaran, dan fungsi pengawasan", jelas Anggota Komisi III DPR RI tersebut. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Hadiri Konsolidasi FPKS, BNPT: PKS Bisa Jadi Mitra Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme

KUTIPAN

Jakarta (24/03) – Dihari kedua pelaksanaannya, acara Konsolidasi Nasional dan Bimteknas Pimpinan Fraksi PKS se-Indonesia tahun 2022 menghadirkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memaparkan materi soal radikalisme.

Dalam kesempatan tersebut, Irfan Idris, yang hadir mewakili BNPT, menyampaikan tentang pentingnya pencegahan terorisme agar masyarakat lebih peduli tentang isu ini. Menurutnya, politisi PKS dapat menjadi jembatan penghubung untuk mensosialisasikan bahaya radikalisme dan terorisme kepada masyarakat.

“PKS dapat mengajak masyarakat mempelajari apa yang dilakukan oleh BNPT agar dapat mengurangi radikalisasi yang ada di Indonesia dengan cara membangun kolaborasi, program kerja, sinergitas dengan seluruh kementerian untuk membina narapidana teroris. Teman PKS dapat

**KONSOLIDASI
NASIONAL &
BIMTEKNAS**
PIMPINAN FRAKSI PKS SE INDONESIA

**SEMANGAT TRANSFORMASI
& KOLABORASI**

mengambil bagian, dengan memberikan wawasan keagamaan dan kebangsaan demi memahami isu teroris yang radikal itu.” ungkapnya.

Irfan pun menyatakan bahwa sebenarnya terorisme ini adalah musuh agama dan negara. Oleh sebab itu, ia pun mengajak masyarakat, termasuk politisi PKS, untuk

berkolaborasi dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan di masyarakat guna mencegah adanya radikalisme.

“Kita sudah sama-sama bekerja tetapi belum ada kerja sama, maka dari itu kita harus menghadapi musuh radikalisme ini, yang berpotensi menjadi tindakan-tindakan teror. Mari, kita berpikir lebih komperhensif, sistematis, dan objektif dalam menanggapi isu seperti ini, dan tidak lupa juga harus memperkuat strategi dan sinergi”, tambahnya.

Menurut Irfan, terorisme adalah kejahatan yang luar biasa, lintas negara, dan sangat serius karena itulah kita harus menghadapi isu ini secara serius. Ia pun berharap kedepannya dapat berkolaborasi dengan menggandeng dan melibatkan semua komponen masyarakat.

“Saya berharap kerja sama dan komunikasi dengan PKS ini dapat menegakan konsepsi Islam yang rahmatan lil alamin, sekaligus membuat rakyat lebih aware dengan isu terorisme. Upaya deradikalisasi



Prof. IRFAN IDRIS

Direktur Deradikalisasi BNPT

“Kita sudah sama-sama bekerja tetapi belum ada kerja sama, maka dari itu kita harus menghadapi musuh radikalisme ini, yang berpotensi menjadi tindakan-tindakan teror. Mari, kita berpikir lebih komperhensif, sistematis, dan objektif dalam menanggapi isu seperti ini, dan tidak lupa juga harus memperkuat strategi dan sinergi”

yang bertujuan dalam pemaknaan, pembinaan, dan pemberdayaan isu radikalisme teroris sudah kami lakukan. Dalam hal ini, politisi perlu

menyampaikan pesan-pesan tersebut dan itulah tugas kita untuk memberi tahu ke masyarakat luas”, tutupnya.

Menyongsong Pemilu 2024, Presiden PKS **Sampaikan** Empat Poin Penting

KUTIPAN

Jakarta (24/03) --- Presiden PKS, Ahmad Syaikh, memberikan arahan kepada Pimpinan Fraksi PKS se-Indonesia dalam acara Konsolidasi Nasional dan Bimteknas di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Kamis (24/03).

Dalam arahnya, ia menyampaikan empat hal penting yang harus dilakukan oleh anggota legislatif (Aleg) PKS dalam menyambut Pemilu mendatang.

Poin pertama, Syaikh meminta agar para anggota legislatif PKS, baik di pusat maupun daerah, fokus untuk menghadapi Pemilu.

"Persiapan kita harus lebih sistematis. Semua wajib mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, saya berharap, koordinasi Aleg Fraksi PKS DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, bisa beriringan dan bergandengan tangan agar hasil terbaik bisa kita dapatkan di Pemilu", ungkap Syaikh.

Saat ini, menurut Syaikh, sinergitas antar Aleg PKS masih

tingkat kabupaten-kota, suaranya lebih naik lagi, mencapai 1,3 juta. Ini menandakan belum ada sinergitas antara pusat, provinsi, dan kota/kabupaten. Jika sinergis, seharusnya perolehan suara yang didapatkan tidak timpang. Sejak hari ini, kita harus tingkatkan koordinasi dan kolaborasi", ungkap Anggota DPR dari Dapil Jawa Barat tersebut.

Selanjutnya, Syaikh juga mengingatkan agar anggota legislatif PKS di seluruh Indonesia melaksanakan fungsi advokasi mereka dengan sebaik mungkin, sembari diimbangi dengan publikasi yang maksimal atas aktivitas-aktivitas tersebut.

"Kerja-kerja kita semua, yang sudah dilakukan oleh DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, harus diampifikasi dan disebar. Hal ini perlu agar kinerja kita diketahui oleh rakyat di seluruh Indonesia. Agar perjuangan kita dapat dirasakan oleh mereka semua", tegasnya.

Oleh sebab itu, imbuh Syaikh, Fraksi PKS harus aktif memproduksi konten-konten kebaikan. Menurutny, melalui Humas yang berfungsi, berita

KONSOLIDASI NASIONAL & BIMTEKNAS

PIMPINAN FRAKSI PKS SE-INDONESIA

SEMANGAT TRANSFORMASI & KOLABORASI



belum maksimal. Hal itu dibuktikan dari laporan sejumlah DPW yang menunjukkan perolehan suara PKS yang relatif tingkat di tiap struktur.

"Beberapa waktu lalu, misalnya, saya bertanya kepada struktur di DPW Jawa Timur. Perolehan suara PKS di Pemilu 2019, 800 ribuan suara. Di tingkat provinsi, di atasnya yakni 1 jutaan. Sementara, di



H. AHMAD SYAIKHU
Presiden PKS

"Saya menginstruksikan setiap Aleg untuk 'mengecor' dapilnya. Namun, tugas penting para Aleg bukan hanya sekadar mengamankan kursi. 'Cor kursi' bukan hanya dimaknai agar kursi tidak pindah ke partai lain, melainkan juga agar kursi kita dapat bertambah. Bekerjalah lebih keras, ke luar dari zona nyaman"

kebaikan akan sampai kepada masyarakat. Di sisi lain, berita hoax terhadap Partai Keadilan Sejahtera akan hilang dengan sendirinya apabila berita kebaikan lebih banyak.

Poin ketiga yang disampaikan

kan Syaikh ialah pentingnya setiap anggota dewan menjaga citranya sebagai public figure dan public opinion.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Hadiri Konsolnas Pimpinan FPKS se-Indonesia, Nevi **Dukung** Agenda Pemenangan 2024

KUTIPAN

Jakarta (23/03) — Anggota DPR RI FPKS asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina menghadiri pembukaan Konsolidasi Nasional Pimpinan Fraksi PKS se-Indonesia di Jakarta yang dimulai Rabu-Sabtu, 23-26 Maret 2022.

"Seluruh anggota DPR RI dari FPKS dan seluruh pimpinan Fraksi DPRD baik tingkat propinsi maupun kabupaten kota diundang hadir pada acara konsolidasi pimpinan Fraksi ini. Karena memang harapan rakyat kepada PKS ini sangat besar. Sebagai partai oposisi yang konstruktif memberi masukan kepada pemerintah agar advokasi kepada masyarakat secara merata, adil dan berkesinambungan", tutur Nevi. Politisi PKS ini menerima arahan dari Ketua Fraksi DPR RI bahwa Perjuangan mimbar parlemen dengan seluruh tingkatan, mesti dapat diterjemahkan secara sederhana dan

**KONSOLIDASI
NASIONAL &
BIMTEKNAS**
PIMPINAN FRAKSI PKS SE INDONESIA

**SEMANGAT TRANSFORMASI
& KOLABORASI**

menarik sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.

"Karena di zaman atau era digital ini, semua peristiwa dapat mudah terdokumentasi sebagai jejak digital. Pertanggungjawaban publik akan mudah dan cepat tersebar, sehingga semua legislator PKS mesti berlomba-lomba dalam

kebaikan," ungkapnya.

Nevi menambahkan, Fraksi PKS melalui pimpinan juga sudah menggariskan akan penyatuan langkah dan sinergitas irama perjuangan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten Kota. Fokus perjuangan pada pembelaan umat, pembelaan rakyat dan menjaga NKRI dari segala ancaman baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar.

"Kita akan menindaklanjuti arahan pimpinan dengan membangun komunikasi seluas-luasnya kepada seluruh pihak dengan cara yang elegan. Negeri yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada ini yang terdiri dari puluhan ribu pulau, mesti dipikul bersama. Tidak bisa oleh orang PKS saja. Inilah implementasi Persatuan Indonesia", tutur Nevi.

Anggota DPR yang duduk di komisi VI ini mengatakan, bahwa pimpinan tertinggi PKS, yakni ketua majelis syuro PKS telah mengingatkan kepada seluruh pimpinan legislator pks agar selalu memberikan



"Kita semua berharap, bahwa kemampuan FPKS di seluruh jenjang mampu memperjuangkan kepentingan rakyat. Cita-cita kami adalah mewujudkan Indonesia yang berkarakter, maju, adil dan sejahtera.

kemanfaatan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya. FPKS diminta untuk menjadi peran terdepan dalam memberikan pelayanan kepada rakyat.

"Kita semua berharap, bahwa kemampuan FPKS di seluruh jenjang mampu memperjuangkan kepentingan rakyat. Cita-cita kami adalah

mewujudkan Indonesia yang berkarakter, maju, adil dan sejahtera. FPKS dimasa depan akan Bangun relasi jejaring dan kemitraan. Salah satu implementasi nyatanya adalah meningkatkan silaturahmi dan aksi nyata di daerah pemilihan", tutup Nevi Zuairina.

Gelar Konsolidasi Pimpinan Fraksi se-Indonesia, Ketua Fraksi PKS Optimis Menang di 2024

KUTIPAN

Jakarta (23/03) -- Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, optimistis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan meraih kesuksesan di Pemilu 2024. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Konsolidasi Nasional dan Bimteknas Fraksi PKS se-Indonesia, Rabu malam (23/03).

"Sejauh ini masih 8% atau 11 juta rakyat yang memilih PKS, kalau kita terus berjuang dan bertanggung jawab untuk rakyat, bukan hal yang tidak mungkin suara PKS akan meningkat 3 kali lipat dan kita akan menjadi Nomor 1 dalam pemilu 2024" tambahnya.

Anggota Komisi I DPR RI ini menyoroti tuntutan masyarakat NKRI yang begitu besar sehingga diperlukan ketekunan dari setiap elemen Fraksi PKS untuk mewujudkannya. Menurutnya, guna meraih kemenangan, penting bagi seluruh kader PKS untuk membangun komunikasi, berkolaborasi,

KONSOLIDASI NASIONAL & BIMTEKNAS
PIMPINAN FRAKSI PKS SE INDONESIA

SEMANGAT TRANSFORMASI & KOLABORASI

serta meningkatkan keterampilan dalam mengiringi perjalannya melayani rakyat NKRI.

"Kita harus berjuang, bekerja keras, dan mengatrasikan perjuangan kita kepada rakyat Indonesia secara umum, dan yang memilih PKS secara khusus", tegas Jazuli.

Ia pun menyoroti pentingnya kolaborasi bagi Fraksi PKS dalam menjalankan tugas yang diemban.

"Kita harus menyamakan persepsi, menyatukan langkah, dan mensinergikan irama. Karena tanggung jawab kita besar di hadapan rakyat. Akan tetapi, kerja besar akan terasa ringan, kerja besar akan terasa kecil, jika kita bekerja bersama-sama, dari Fraksi pusat, hingga fraksi provinsi dan kabupaten/kota", papar Jazuli.

Selain kolaborasi, imbuh Jazuli, membangun komunikasi juga menjadi hal krusial yang harus diperhatikan oleh seluruh elemen Fraksi. Komunikasi ini perlu dibangun dengan elegan dan seluas-luasnya.

"Beberapa dalil yang ada telah mengajarkan kita untuk berkomunikasi dengan elegan, yakni menyesuaikan cara berkomunikasi dengan siapa lawan bicara yang dituju. Maka, bicara dengan rakyat pun perlu penyesuaian, tidak perlu menggunakan bahasa yang tinggi. Masyarakat akan mengerti jika kita membantu



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Kita harus menyamakan persepsi, menyatukan langkah, dan mensinergikan irama. Karena tanggung jawab kita besar di hadapan rakyat. Akan tetapi, kerja besar akan terasa ringan, kerja besar akan terasa kecil, jika kita bekerja bersama-sama, dari Fraksi pusat, hingga fraksi provinsi dan kabupaten/kota",

mereka dengan aksi nyata", tegas Jazuli.

Terakhir, Jazuli pun menilai bahwa peningkatan keterampilan menjadi poin penting untuk masa depan fraksi dan perlu menjadi agenda yang

diperhatikan oleh seluruh elemen fraksi.

"Kita harus meningkatkan keterampilan, agar perjuangan kita dapat sesuai dengan tuntutan yang ada" tutupnya.

Diskusi Dengan DPRD,

Aleg PKS: Pastikan Advokasi dan Anggaran Daerah Tepat Sasaran

KUTIPAN

Jakarta (27/03) — Konsolidasi Nasional Pimpinan Fraksi PKS se-Indonesia turut menyelenggarakan diskusi bertema Strategi Advokasi dan Anggaran Program di Daerah, yang difasilitasi oleh Anggota Legislatif Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah serta Ketua DPRD Bogor Atang Trisnanto dan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti, pada Jumat siang (25/03).

Mengawali acara, Ledia Hanifa memberikan kesempatan kepada Atang untuk memberikan materi singkat yang berisi strategi membentuk komunikasi dengan pemangku kepentingan di daerahnya. Atang mengatakan

“Sebagai ketua DPRD kami bisa berpengaruh dan membuat irama permainan, irama rapat, irama keputusan sehingga dapat melakukan advokasi yang berkesinambungan. Temui pemkot, kami bilang akan

KONSOLIDASI NASIONAL & BIMTEKNAS
PIMPINAN FRAKSI PKS SE-INDONESIA

membantu sukseskan program-programnya tapi bantu kami juga dalam menyerap aspirasi masyarakat. Bangunlah kesepahaman peran eksekutif dan legislatif” tutur Atang.

Selanjutnya sesi dibawakan oleh Reni yang menekankan akan bagaimana

membuka pintu-pintu komunikasi hingga bisa masuk ke segmen lawan. Reni mengusung tema “Sinergi elit, bela layani alit”. Slogan tersebut diartikan sebagai keseimbangan antara bertemu pemangku kepentingan dan waktu melayani rakyat.

“Mencoba membangun komunikasi dengan mereka yang tidak suka dengan PKS. Saya tidak sogan duduk bersama dan mengobrol, saya merasa baik-baik saja selama mereka tidak mengganggu PKS. Kita harus mempunyai ruang luas agar gerak tak terbatas. Siang ketemu elit saat malam kita ketemu alit itu saja, jadi ada sinergitas dari kaum elit dan alit” ucap Reni.

Sejalan dengan hal tersebut Ledia mengingatkan terkait kehumasan daerah yang akan menjadi sarana penghubung juga dengan berbagai kalangan. Terakhir Ledia menekankan anggaran daerah yang harus tepat sasaran, sehingga seluruh dewan di daerah diharuskan memperhatikan laporan anggaran yang terjadi.

“Pimpinan harus tau dana alokasi harus tau jatuhnya kemana saja, karena sekarang modelnya menurunkan APBN ke APBD, sehingga tidak terkontrol DPR RI, maka pimpinan daerah yg harus mengontrol, harus terus dipantau” pungkas Ledia.



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

“Pimpinan harus tau dana alokasi harus tau jatuhnya kemana saja, karena sekarang modelnya menurunkan APBN ke APBD, sehingga tidak terkontrol DPR RI, maka pimpinan daerah yg harus mengontrol, harus terus dipantau”

KONSOLIDASI NASIONAL & BIMTEKNAS 2022

23-26 MARET 2022

PIMPINAN FRAKSI PKS SE INDONESIA

TERKINI

Rabu, 23 Maret 2022

BERITA FOTO

Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Salim Segaf Aljufri membuka langsung secara simbolik berupa penyerahan wayang kulit kepada Ki H Sujiwo Tejo sekaligus dimulainya pertunjukan wayang bertema Brajadentist Mbalelo. pada Rabu Malam 23 Maret 2022.



Pergelaran Wayang Meriahkan
Pembukaan Konsolidasi Nasional
Pimpinan Fraksi PKS Se Indonesia



Soal Dukungan 3 Periode, HNW Tolak Manuver 'Apdesi' yang Tak Sesuai Konstitusi

KUTIPAN

Jakarta (31/03) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengingatkan sesudah KPU melakukan simulasi penyelenggaraan Pemilu 14/2/2024 sesuai keputusan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR pada (24/01/2022).

Mestinya, kata Hidayat, manuver yang dilakukan dan diperbolehkan adalah bagaimana mendukung agar Keputusan KPU yang konstitusional itu bisa terlaksana dengan sukses, sehingga menghadirkan hasil Pemilu serentak pada tahun 2024 yang lebih baik daripada Pemilu sebelumnya.

"Bukan malah menciptakan kondisi dengan manuver yang melibatkan sekelompok orang yang mengatasnamakan Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia (APDESI), karena manuver politik yang akan umumkan deklarasi dukungan Presiden Jokowi 3 itu tak sesuai dengan Konstitusi, juga tak sejalan dengan

Keputusan mufakat KPU, DPR dan Pemerintah, dan tak sesuai juga dengan UU Desa.

"Seharusnya sekalipun mereka mengaku dari APDESI, maka saat berjumpa dengan Presiden Jokowi justru memperjuangkan nasib Rakyat Desa yang mereka pimpin, dengan menagih realisasi janji kampanye, dan meminta solusi kepada Presiden Jokowi terkait masalah-masalah yang memberatkan masyarakat desa saat ini, seperti kelangkaan atau mahalnnya minyak goreng, serta mahalnnya kebutuhan bahan pokok lainnya seperti tahu, tempe, telur, gas elpiji, tarif dasar listrik, BBM.

Sementara harga gabah malah turun. Dan tidak sebagaimana

dijanjikan Jokowi, bawang putih, cabai dan garam ternyata masih impor juga. Disayangkan sekali, alih-alih focus pada masalah-masalah yang dihadapi Rakyat di Desa, mereka yang mengatasnamakan APDESI malah menyatakan akan mendeklarasikan dukungan Jokowi 3 periode. Padahal itu tidak sesuai dengan ketentuan Konstitusi, tidak sesuai dengan kesepakatan Pemerintah dengan DPR dan KPU, juga tidak sejalan dengan kewajiban dan larangan terhadap kepala Desa sebagaimana diatur oleh UU Desa," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (31/3).

HNW mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi tapi juga negara hukum. Ketentuan UUDNRI 1945, sebagai hukum dasar bangsa Indonesia, telah dengan jelas dan tegas membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode masing-masingnya 5 tahun, melalui Pemilihan Umum.

Selengkapnya kunjungi
fraksi.pks.id



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Wakil Ketua MPR RI

"Mestinya Presiden Jokowi lebih tegas menampilkan sikap negarawan dengan mengkoreksi dan mengajari mereka untuk benar2 taat pada konstitusi, dan tidak malah membiarkan mereka melakukan aksi-aksi yang tidak sesuai dengan Konstitusi, tidak sesuai Kesepakatan Pemerintah dengan KPU dan DPR, serta tidak sesuai juga dengan UU Desa, seperti manuver yang akan deklarasikan dukungan presiden 3 periode



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan
Setiap Pekan***